

**GERAKAN SOSIAL MASYARAKAT SIPIL
DALAM PENOLAKAN PABRIK KARET DI DESA MEDALI**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Sosiologi**



Disusun oleh:

**SUPRAPTO
NIM: 201710270211010**

**DIREKTORAT PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
Juli 2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat, dan karuniannya sehingga Tesis dengan judul **“Gerakan Sosial Masyarakat Sipil dalam Penolakan Pabrik Karet di Desa Medali”** sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Studi Magister Sosiologi pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.

Selama penyusunan Tesis ini mulai dari perencanaan sampai penyelesaian penulisan laporan banyak pihak yang turut membantu baik moril maupun materiil. Oleh karenanya penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung terselesaikannya Tesis ini. Pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Kedua orang tua dan keluarga yang secara ikhlas mendoakan, membimbing dan memberikan semangat demi terselesaikannya Tesis ini.
2. Akhsanul In'am, Ph.D selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Prof. Dr. Ishomuddin, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Sosiologi
4. Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan terselesaikannya Tesis ini.
5. Dr. Saiman, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberi motivasi dan arahan demi terselesaikannya Tesis ini.
6. Dr. Sakban Rosidi, M.Si., Dr. Rofiqoh, M.Pd., KH. Mansur Abdullah, M.Pd.I., Gilang Afif Lazuardi, Dr. Rachman Sidharta Arisandi, M.Si., selaku orang terdekat yang tanpa pamrih memberi arahan, motivasi, dukungan, serta doa dalam menempuh studi Magister.
7. Kepala Desa Medali beserta perangkatnya yang bersedia memberikan data sebagai bagian dari kebutuhan penelitian ini.
8. Serta orang-orang terkait yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang telah mendukung dalam menempuh studi magister.

Penyusunan Tesis ini penulis sadar masih banyak kekurangan. Penulis berharap kritik dan saran yang membangun agar Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca secara umum. Sehingga Tesis ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan.

Malang, 25 Juli 2019

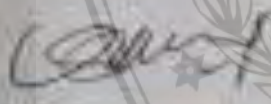
Peneliti

GERAKAN SOSIAL MASYARAKAT SIPIL
DALAM PENOLAKAN PABRIK KARET
DI DESA MEDALI

(Disusun Oleh)

SEPRAPTO
101101270310110

Pembimbing I (Dosen)

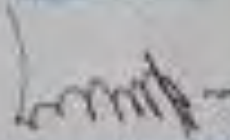

Dr. Tri Subaryaningrat, SLS

Pembimbing II (Dosen)


Dr. Idris Abdillah, SLS

Uraian (Penelitian Tindakan)

Musyawarah (Konsultasi)



Prof. Dr. Idris Abdillah, SLS



Salinan In'am, Pn.Jl

TESIS

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

SUPRAPTO

201710270211010

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, **Kamis/25 Juli 2019**
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si

Sekretaris : Dr. Saiman, M.Si

Penguji I : Prof. Dr. Ishomuddin, M.Si

Penguji II : Dr. Vina Salviana D.S, M.Si

Yang berprestasi akan di berikan hadiah

Volume 1.8

4541

Project Study

Project Study

[illegible]

100% Satisfaction
Money Back Guarantee

Machine Number

1. TESIS dengan judul *GEMAS*

1. TENIS dengan judul GERAKAN SOKET HAWARAKESOHTE DALAM
PENOLAKAN PAMBIK KARET ALDESA SUDALE
2. Adalah karya saya dan dapat diakui untuk hak cipta yang diakui oleh
pembuat diadukan oleh orang lain yang melanggar hak cipta dan
Peraturan Tuntutan dan tidak mengakui karya saya sebagai orang pribadi dan
nama diterbitkan oleh orang lain, baik sebagai penulis, penyunting, korektor,
yang secara sengaja dikaitkan dalam karya saya dan diterbitkan dalam bentuk
karya dalam dunia publikasi
3. Apabila ternyata saya tidak menemukan kesalahan yang terdapat
PLAGIASI, saya bersedia dikenakan HUKUMAN DAN GELAB
AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROTHI DITAMBAH, dan
diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
4. Tesis ini dapat diadukan untuk hak cipta yang melanggar HAK HUKAS
ROYALTY NON EKSLUSIF

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Sydney, 29 Jan 2009

Yours very truly,

METERAI
TEMPEL
6000

SUPPLANTO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
ABSTRAK	iv
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang Masalah	1
Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian	2
KAJIAN PUSTAKA	3
Tindakan Kolektif, Aktor, Ideologi dan Mobilisasi Sumberdaya	3
Mobilisasi Sumberdaya	5
Konsep Gerakan Sosial	6
Gerakan Sosial Lama dan Baru (<i>Old and New Social Movement</i>)	6
Konsep Masyarakat Sipil	8
Penelitian Terdahulu	10
METODE PENELITIAN	11
Paradigma Penelitian	11
Pendekatan dan Jenis Penelitian	11
Kehadiran Peneliti	12
Lokasi dan Subyek Penelitian	12
Teknik Analisis Data	12
Pengecekan Keabsahan Data	13
ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN	13
Penyebab dan Alasan Gerakan Sosial Masyarakat Sipil	13
Sosio Kultur Masyarakat Medali	13
Nilai Dan Norma Sosial Masyarakat Medali	14
Struktur Sosial Masyarakat Medali	14
Amdal dan Masalah Lingkungan	15
Proses Kronologis-Logis Gerakan Sosial Masyarakat Sipil	16
Mobilisasi Sumberdaya dan Tindakan Kolektif	16
Gerakan Sosial Masyarakat Sipil	19
Unjuk Rasa/Demonstrasi	20
Taktik dan Partisipasi dalam Penutupan Pabrik Karet	23
Akibat Gerakan Sosial	26
PENUTUP	28
Kesimpulan	28
Saran/Rekomendasi	28
DAFTAR PUSTAKA	29

DAFTAR GAMBAR

1. Hubungan antara negara, masyarakat sipil formal dan informal dan komunitas -----	10
2. Faktor Determinan Gerakan Sosial dalam Mobilisasi Sumberdaya -----	17
3. Kepala Desa bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto-----	22
4. Proses Kronologis-Logis Gerakan Sosial -----	25



Abstrak

Suprpto, 2019. **Gerakan Sosial Masyarakat Sipil dalam Penolakan Pabrik Karet di Desa Medali**. Tesis, Program Studi Magister Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang. Dosen Pembimbing (I) Dr. Tri Sulistyoningsih, M.Si dan Dosen Pembimbing (II) Dr. Saiman, M.Si.

Pencemaran lingkungan dapat ditandai adanya limbah pabrik. Pencemaran limbah pabrik karet berkaitan dengan limbah cair. Sejauh ini, penanganan terhadap pencemaran, dampak terhadap lingkungan, pengkajian lokasi pendirian pabrik dilakukan untuk memberi kritik atas keberadaan pabrik karet. Kritik dilakukan oleh Kepala Desa, Tokoh Agama, dan Masyarakat Peduli Lingkungan (MPL). Kritik berupa aksi penolakan merupakan bagian tak terpisahkan dari gerakan sosial. Mencermati kasus tersebut, penelitian ini berfokus pada 3 (tiga) masalah utama. Apa penyebab dan alasan gerakan sosial masyarakat sipil pada kasus pabrik karet di Desa Medali? Bagaimana proses kronologis-logis gerakan sosial masyarakat sipil pada kasus pabrik karet di Desa Medali? Apa akibat dari gerakan sosial masyarakat sipil pada kasus pabrik karet di Desa Medali? Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan mendeskripsikan penyebab, alasan, kronologi, dan akibat gerakan sosial masyarakat sipil.

Pendekatan teoretik penting dalam penelitian ini meliputi tindakan kolektif, aktor, ideologi, mobilisasi sumberdaya, gerakan sosial lama dan baru, dan masyarakat sipil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan paradigma kritis yang mencakup aspek pemahaman, kesadaran, hingga tindakan gerakan sosial (epistemologi, ontologi, dan aksiologi). Metode observasi, wawancara, studi dokumentasi untuk menganalisis catatan lapangan yang direduksi, dideskripsikan, dianalisis, dan ditafsirkan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan dan dukungan kepala desa sebagai pemimpin gerakan sosial berimplikasi pada hasil (*outcome*) gerakan. Secara ideologis terdapat pertentangan 2 (dua) ideologi yang bertolak belakang yakni ideologi kapitalis dan environmental. Ideologi kapitalis ini merupakan salah satu perhatian dalam gerakan sosial lama. Sedangkan ideologi environmental merupakan salah satu bidang perhatian gerakan sosial baru. Keberhasilan dan keberlangsungan tindakan kolektif diprasyarati oleh keberhasilan pemimpin dalam menggerakkan orang lain dan mengerahkan sumberdaya yang bisa diperoleh. Keberhasilan dalam menggerakkan orang lain berkontribusi lebih penting dibanding mengerahkan sumberdaya. Kesungguhan dan keberhasilan pemimpin dalam menggerakkan sumberdaya dan orang lain diprasyarati oleh kapabilitas sosial dan hubungan politis antara pemimpin dengan partisipan gerakan.

Kata Kunci: Gerakan Sosial, Masyarakat Sipil, Mobilisasi Sumberdaya, Tindakan Kolektif

Abstract

Suprpto, 2019. **Social Movement of Civil Society in the Rejection of Rubber Factory in Medali Village.** Thesis, Master in Sociology, University of Muhammadiyah Malang. Advisor (I) Dr. Tri Sulistyoningih, M.Si and Advisor (II) Dr. Saiman, M.Si.

Environmental pollution can be characterized by industrial waste. The sewage pollution of the rubber plant is associated with liquid waste. So far, treatment of pollution, the impact on the environment, studies of the site a factory's establishment are being criticized for the existence of rubber plants. Criticism was carried out by the village chief, religious figures, and Masyarakat Peduli Lingkungan (MPL). The criticism of refusal is an integral part of the social movement. Looked into the case, the research focuses on three major problems. What are the causes and reasons for the social movements of the civil society in the rubber factory case of Medali village? How is the chronological-logical process social movements of the civil society in the rubber factory case of Medali village? What the result of the social movements of civil society in the rubber factory case of Medali village? This study served to reveal and illustrate the causes, causes, chronology, and results of the social movements of civil society.

The important theoretical approach in this research covers to collective action, actor, ideology, resources mobilization, old and new social movements, and civil society. This research used a qualitative approach to case studies with a critical paradigm that includes understanding, awareness, to social movements (epistemology, ontology, and axiology). The methods of observation, interviews, documentation studies to analyze reduced field notes, described, analyzed, and interpreted.

Research findings suggest that the involvement and support of the village chief as leader of the social movement would have implications on the outcome. The ideological opposite of capitalists and environmental ideology. This capitalist ideology is one of the hallmarks of the old social movement. Whereas the ideology of environmental is one of the areas of attention to new social movements. Success and collective action are contested by leaders' success in inciting others and exerting the resources they can obtain. Success in getting others to contribute more important than exerting resources. The leaders' earnestness and success in moving the resources and others are conditioned by social skills and political relations between leaders and participants of the movement.

Key words: Social Movements, Civil Society, Resources Mobilization, Collective Action

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Rendahnya orientasi pelestarian lingkungan dapat memunculkan dampak pada pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan dalam hal ini ditandai adanya limbah pabrik yang dibuang secara langsung ke tanah, sungai, atau udara. Pencemaran tersebut terjadi akibat bahan-bahan kimia industri yang dibuang tanpa memperhatikan syarat-syarat dampak lingkungan. Atas pertimbangan dampak lingkungan, kemudian diseimbangkan dengan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang harus dipenuhi sebelum ijin operasional pabrik.

Berkaitan dengan pencemaran lingkungan, lebih spesifik kajian ini mencermati tentang pencemaran yang diakibatkan keberadaan pabrik karet. Pencemaran pabrik karet terutama berkaitan dengan limbah cair. Limbah cair sangat berpotensi menyebar pada unsur tanah dan sungai. Bagaimanapun kondisinya, pencemaran berupa limbah telah mengganggu dan mengusik pada masyarakat terdampak. Sangat wajar manakala masyarakat melakukan protes atas kondisi yang dialaminya.

Berdasarkan pendekatan sosial-ekologis, pencemaran pabrik karet menuai kritik dari warga masyarakat. Atas dasar pertimbangan lingkungan, memang tidak bisa dibenarkan akan adanya pencemaran. Apalagi pencemarannya diakibatkan oleh limbah pabrik karet. Sebagaimana pernyataan (Salim, 1986: 32), sumberdaya alam menjadi produk baru (barang produksi pabrik), niscaya menghasilkan pula kotoran, limbah dan sisa ampas pencemar lingkungan.

Pencemaran dari pabrik karet ini kemudian menuai konflik dan penolakan yang menyebabkan beberapa kerugian bagi warga sekitar pabrik karet. Ada kerugian materiil dan non-materiil. Kerugian materiil berupa: pencemaran pada sumur (air), tanah, dan udara. Kerugian non-materiil berupa: infeksi kulit dan gatal-gatal, sesak nafas dan batuk. Akibat pencemaran pula, masyarakat tak dapat menikmati makanan karena terganggu oleh pencemaran. Dalam mencermati beberapa kerugian, Rosidi (1998: 2) memberi penekanan bahwa terdapat sejumlah biaya eksternal, seperti biaya pencemaran, biaya sosial, dan biaya masa depan.

Berkenaan dengan konflik, Veeger (1985: 215) menjelaskan ada konflik kecil (individu dengan individu) dan konflik besar (kelompok dengan kelompok). Konflik yang menimbulkan kericuhan dan unjuk rasa (besar) terjadi karena kekuasaan, kepentingan, dan kelompok konflik. Sebab, semakin besar derajat emosional pada konflik, akan menguatkan konflik yg terjadi (Turner, 1974: 86). Terdapat proses yang beruntun pada kasus tersebut, yaitu: a) dikenalnya pencemaran yang diakibatkan oleh pabrik karet; b) interaksi antara satu individu pada individu lain; c) muncul ketidaksepakatan warga masyarakat; d) pengkajian kasus; dan e) aksi unjuk rasa (demonstrasi). Keterhubungan konflik-perlawanan, bagi Meissonier dan Houze (2010: 541) menganggap resistensi sebagai dimensi perilaku konflik atau cara seseorang mengekspresikan konflik.

Lebih lanjut, konflik didahului adanya penyatuan pemahaman dan pernyataan sikap warga yang diapresiasi melalui aksi demonstrasi. Tindakan demonstrasi/aksi massa yang dilakukan masyarakat dapat digolongkan pada bentuk kolektifis (asosiasi individu-individu) dan individualis (individu terpisah dari asosiasi) (Sargent, 1986: 207).

Sejauh ini, penanganan terhadap pencemaran, dampak terhadap lingkungan, pengkajian lokasi pendirian pabrik, dilakukan untuk memberi kritik atas keberadaan pabrik karet. Kritik tersebut dilakukan oleh masyarakat sipil informal, yakni: tokoh Agama, dan Masyarakat Peduli Lingkungan (MPL) yang didukung oleh Kepala Desa sebagai aparatus negara. Dalam hal ini, masyarakat sipil informal yang merupakan bagian dari aktor turut mempengaruhi masyarakat baik aspek pemahaman dan kesadaran. Mengikuti pandangan strukturalisme dan 'post-strukturalisme' Giddens (1984), seorang aktor menekankan sifat aktif, reflektif dari perilaku manusia. Aksi penolakan yang dipengaruhi aktor merupakan bagian tak terpisahkan dari gerakan sosial (Schaeffer, 2014) dan perjuangan-perjuangan lingkungan (*savety ecologies*) (Heywood, 2003).

Bila dicermati, gerakan sosial dipengaruhi adanya tindakan kolektif (Buechler, 1995) dan mobilisasi sumberdaya (McCarthy dan Zald, 1977). Demikian pula efek gerakan sosial tergolong dalam agenda penolakan. Menurut Vinthagen dan Johansson (2013: 5), perlawanan ada sebagai deklarasi secara terbuka (pemberontakan terbuka, petisi, demonstrasi, dan invasi tanah).

Rumusan Masalah, Tujuan, dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian ini berfokus pada 3 (tiga) pertanyaan, yakni: Apa penyebab dan alasan gerakan sosial masyarakat sipil pada kasus pabrik karet di Desa Medali? Bagaimana proses kronologis-logis gerakan sosial masyarakat sipil pada kasus pabrik karet di Desa Medali? Apa akibat dari gerakan sosial masyarakat sipil pada kasus pabrik karet di Desa Medali? Sesuai 3 (tiga) pertanyaan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Mengungkap penyebab dan alasan gerakan sosial masyarakat sipil pada kasus pabrik karet di Desa Medali, 2) Mendeskripsikan dan menjelaskan proses kronologis-logis gerakan sosial masyarakat sipil pada kasus pabrik karet di Desa Medali, 3) Mengungkap akibat dari gerakan sosial masyarakat sipil pada kasus pabrik karet di Desa Medali. Penelitian ini sekurang-kurangnya memberikan muatan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan kajian gerakan sosial berdasarkan perspektif warga sekitar pada kasus pencemaran pabrik karet. Secara praktis, penelitian ini untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan langkah-langkah teknis yang dapat digunakan sebagai acuan melakukan gerakan sosial.

KAJIAN PUSTAKA

Tindakan kolektif, Aktor, Ideologi, dan Mobilisasi sumberdaya

Pendekatan tindakan kolektif secara logis memusatkan pada aspek: 1) perilaku kelompok dan organisasi, 2) efektivitas kelompok-kelompok kecil (implikasi tindakan rasional), 3) serikat pekerja dan kebebasan ekonomi, 4) analisis teori kelas dalam negara, 5) analisis teori kelompok dari kelompok penekan, 6) kelompok penekan yang konsisten dengan hubungan logis (Olson, 1971: 3). Tilly (Goodwin dan Jasper, 2006: 614-615) menggambarkan tindakan kolektif sebagai fungsi kepentingan, organisasi, mobilisasi sumber daya, kekuasaan, represi (atau fasilitas), dan peluang (atau ancaman). Pada pendekatan reduksionisme ekonomi Marxisme, tindakan sosial mengasumsikan logika ekonomi dan hubungan kelas (Buechler, 1995; Olson, 1971). Sedangkan pada pendekatan holistik, Olson (1971) menaruh perhatian tindakan kolektif pada kepentingan rasional.

Sejalan dengan teori-teori yang menekankan rasionalitas (Waters, 1994) yang merupakan sub tipe dari teori agensi mendasarkan pada sifat individualistik. Pendekatan ini selaras dengan teori pilihan rasional yang dielaborasi teori pertukaran (*exchange theory*), (Coleman, 1986). Bagi Hobbes, teori pilihan rasional oleh Hobbes diasumsikan sebagai pilihan yang berasal dari 'selera' dan 'kebencian' yang digelar secara universal. Kemudian dikembangkan oleh Hutcheson, Hume, Smith, (Oppenheimer, 2008: 2). Berdasarkan teori ini, Coleman telah menempatkan struktur tindakan (fokus pada otoritas, sistem kepercayaan, perilaku kolektif, dan norma-norma), (Lindenberg, 2004: 114).

Pendekatan sosiologis pada sistem sosial seperti dikemukakan Parsons (1974), yang mencakup struktur dan tindakan sosial banyak berhubungan dengan aktor sebagai mode orientasi dan motivasi (Turner, 2006: 4). Mengacu gagasan Marx, aktor secara politis, memiliki perhatian pada minat untuk membebaskan orang dari struktur kapitalisme yang menindas. Berbeda dengan perspektif dialektis Marx (Ritzer, 2011: 48), hubungan dinamis dibentuk melalui aktor dan struktur sosial. Maka, aktivitas aktor membentuk dan mereproduksi bagian struktural dari sistem sosial (Giddens, 2009: 39).

Para penulis *Marxian Socialism*, seperti Sweezy (1960: 30) menempatkan para aktor memiliki berbagai pilihan yang ditetapkan oleh sifat dan hukum dari struktur sosial. Hal ini senada dengan pandangan Weber, bahwa aktor terkonseptualisasi pada rasionalitas formal yang mengacu pada aturan, peraturan, dan hukum, (Ritzer, 2011: 26-29). Sedang dalam pendekatan komunikasi, Habermas mendasarkan aktor pada rencana yang menyiratkan kebenaran yang dapat diproyeksikan dan dapat disadari. Tindakan aktor pun diarahkan pada tujuan yang rasional. dari ekspresi rasional aktor, memiliki karakter tindakan bermakna dan berhubungan dengan dunia objektif, (Habermas, 1981: 11-17).

Struktur kemasyarakatan dalam bentuk-bentuk karakteristik aktor atas kombinasi individu-agregasi konkret dan kolektivitas. Struktur tersebut meliputi

"plurality patterns," "form aspects" of human interaction, or, most commonly, "groups" and "communities." (Hertzler, 1954: 7). Selain sebagai bagian dari struktur, aktor sebagai bagian dari kelompok *gemeinschaft by mind* (Tonnies, 2001), memiliki organisasi formal untuk membentuk dialektika, idealisme, gerakan, dan tindakan kolektif.

Perhatian aktor, masyarakat sebagai satu kesatuan ideologis juga berpumpun pada bidang lingkungan/ekologi. Sejalan dengan pernyataan tersebut, diperkuat oleh Vladimirov dan Georgieva (2014: 359) bahwa eklogisme sebagai ideologi mengembangkan ide dalam bentuk hubungan antara manusia dan alam. pemikiran ini kemudian menghasilkan dua konsep ideologi dalam politik lingkungan yakni ekologi dan environmentalisme. Sebagai bagian dari politik ekologi, Burger (O'Riordan, 1977: 13) menyebut para aktor sebagai "aktivis ekologi radikal", dengan gerakan konfrontasi terus menerus untuk membentuk kesadaran bagaimana masyarakat beroperasi, termasuk untuk mempengaruhi posisi pemimpin dan eksekutif. Maka, pemahaman ideologi bagi Jost (2006: 652) berfokus pada karakteristik dan konsekuensi dari ideologi itu sendiri.

Pada pendekatan dialektika terdapat sistem ide, distribusi nilai-nilai politik dan sosial yang disepakati melalui hubungan sosial (Knight, 2006:622), kehidupan sosial, politik, tindakan, dan struktur sosial (Eagleton, 1991: 1-2). Ideologi menandakan seperangkat nilai, keyakinan, asumsi, dan harapan Cole (2018) yang berfungsi sebagai panduan untuk perubahan melalui proses pemikiran normatif (Selva, Doménech, dan Gash, 2017: 4) termasuk membingkai paradigma pembangunan bagi masyarakat (Peter dan Madubuike, 2014: 333).

Sebagaimana disampaikan Cole (2018), Dijk (1998: 15-126) ideologi dibentuk karena: kesatuan ide individu dan kelompok, keberadaan simbol sebagai pemersatu, dan tindakan kolektif. Sebagian besar ideologi yang mengendalikan kehidupan sehari-hari secara bertahap yang diperoleh atas dasar sejumlah besar pengalaman dan wacana pribadi, dan karenanya memiliki 'akar empiris' dalam model-model pribadi.

Berkenaan dengan ideologi, alasan yang dipakai Scott (1990: 86) lebih pada penggabungan gagasan ideologis yang diarahkan pada dominasi ke bawah. secara fungsional dan aturan, membentuk adaptasi yang konstruktif dari kultur pada tahapan permainan, (Turner, 2006: 165). Bila dipahami melalui neo-marxis (Marx, 1883) dan hegemoni (Gramsci, 1937) maka terdapat ketegangan, kesenjangan yang sengaja dibentuk, (Ramos, 1982), (Scott, 1990). Perspektif ini sebagaimana bentuk tindakan konfrontasi dari dua kelas (penguasa-pekerja), (Ritzer, 2011: 45) atau borjuis dan proletar, (Elster, 2000).

Selain control kekuasaan dari penguasa, atau praktek hegemoni, dapat pula disebabkan oleh aksi-aksi kekerasan atau kejahatan, atau justru diskriminasi yang diakibatkan dari keputusan kebijakan, (Ritzer, 2011: 474). Dalam pendekatan kekuasaan, Dahrendorf (1959: 180-181) menempatkan *interest group* sebagai

kelompok konflik yang memiliki struktur, bentuk organisasi, program atau tujuan, dan personel atau anggota.

Menurut Hummel (2016: 495), dalam pandangan konservatif, dimana keyakinan terus menerus menyesuaikan proses ekologi-ekonomi-produksi dan juga sebaliknya. Senada dengan itu, Simon dan Ingram (2004: 33) menunjukkan bagaimana ideologi politik bersilang dengan kebutuhan sumber daya untuk menghasilkan persaingan dan mutualisme antar organisasi. Sementara Bookchin mengkritik tren anti-ekologis di bawah gerbang „*social ecology*“ bidang geografi anarkis untuk menunjuk '*freedom of ecology*' sebagai keterlibatan berkelanjutan pada keadilan lingkungan, keamanan sumber daya, dan tata kelola ekologi (Collet dan Springer, 2017).

Mobilisasi Sumberdaya

Bermula dari teori gerakan sosial yang berkembang atas dasar 2 (dua) perspektif yakni *deprivation theory* dan *mass society theory*. Perspektif *deprivation theory* menunjukkan rasa kehilangan dan harapan. Pada perspektif *mass society theory* kunci utama adalah isolasi sosial. Isolasi sosial diasumsikan sebagai masyarakat modern terasingkan, tidak bermoral, apatis, dan menghambat individualitas (Stolley, 2015:192).

Munculnya *new social movement* (NSM), berpandangan 2 (dua) perspektif *deprivation theory* dan *mass society theory* tidak relevan sebagai kajian teoritik. NSM berfokus pada tindakan kolektif dan mobilisasi sumberdaya yang mengikat pengalaman individu dengan tujuan gerakan (Stolley, 2005:192). Teori mobilisasi sumber daya mengakui organisasi sebagai gerakan sosial dengan sumber daya yang memadai, dan substansial. Secara formal sumberdaya tersebut dimobilisasi dalam bentuk *social movement organizations* (SMOs) (Stolley, 2005: 192).

Seperti konsep Goodwin dan Jasper (2006: 614), kemunculan gerakan sosial dipengaruhi adanya mobilisasi sumberdaya (*resource mobilization*). Mobilisasi sumberdaya dalam gerakan sosial bagi Brulle (Snow, Soule, dan Kriesi, 2006: 608) merupakan gerakan perintis pembangunan masyarakat sipil global. Begitu pula pendekatan mobilisasi sumber daya menekankan dukungan sosial dan kendala dari fenomena gerakan sosial (McCarthy dan Zald, 1977: 1213).

Secara umum teori mobilisasi sumber daya berkembang atas pengaruh tindakan rasional, tindakan kolektif, dan gerakan sosial (McCarthy dan Zald, 1977; Goodwin dan Jasper, 2006; Jenkins, 1983). *Social movement organizations* (SMOs) menjadi basis sumber daya dari lingkungan, dan segenap pengerahan sumber daya untuk meningkatkan dukungan baik dari masyarakat umum maupun elit (Della Porta dan Diani, 2006: 137). Artinya secara strategis, gerakan dibentuk oleh lingkungan politik, (Jenkins, 1983: 538-549).

Konsep Gerakan Sosial

Kajian-kajian gerakan sosial pada umumnya mengacu pada tradisi kritis yang dibangun Marx beserta para pengikutnya (*Marxian*). Menurut Fuchs (2015: 1) pendekatan kritis merupakan cara dialektis dengan menganalisis ekonomi politik, dominasi, eksploitasi, dan ideologi. Mengikuti penjelasan kritis pula, Collins (Goodwin, Jasper, and Polletta, 2001: 27) menambahkan massa kritis berkembang karena dinamika emosional. Gerakan sosial, baik kelompok gerakan sosial lama (*Marxist*) maupun gerakan sosial baru (*post-marxist*), menjadi kajian kritis atas analisa tindakan kolektif (Buechler, 1995: 441). Kajian gerakan sosial baru juga diwarnai oleh 4 (empat) teoritis seperti Manuel Castells (dinamika kapitalis), Alain Touraine (tindakan sosial reflektif, kontrol historisitas), Alberto Melucci (konstruksi sosial, pendekatan budaya (Goodwin dan Jasper, 2006: 616)), dan Jurgen Habermas (struktur sosial modern) (Buechler, 1995: 443-446; Fuchs, 2006: 103-106).

Gerakan sosial juga ditujukan untuk menganalisis masalah sosial (*social problem*) dalam rangka melakukan perubahan sosial (*social change*). Perubahan melalui gerakan sosial, diselaraskan dengan kritik kebijakan dan mobilisasi gerakan (*mobilization of movement*). Korelasi atas kebijakan dan mobilisasi gerakan dilihat dari aspek: tekanan gerakan, opini publik, kekuatan kelompok gerakan, dan tingkat inovasi kebijakan (Diani, 1997: 131). Kerangka kerja yang dibangun diarahkan melakukan negosiasi pemahaman, membuat atribusi, dan mendesak untuk mempengaruhi perubahan (Benford dan Snow, 2000: 615). Pada bagian penilaian studi gerakan sosial mencoba mengintegrasikan konstruksi sosial (Melucci) dengan catatan strukturalis (Goodwin and Jasper) tentang gerakan sosial yang didasarkan pada: 1) kerangka (*framing*), 2) budaya (*culture*), 3) identitas (*identities*), dan 4) emosi (*emotions*) (Oliver, Cadena-Roa, and Strawn, 2003: 227-232).

Menurut Tejerina dan Perugorria (2012: 94), mengacu pada jenis gerakan sosial baru (*new social movement*) terdapat aspek lingkungan yang menjadi perhatian gerakan. Senada dengan jenis gerakan sosial, pada aspek ideologi dan identitas, Johnston, Larana, dan Gusfield (1994: 22-24) membagi gerakan sosial dalam 2 (dua) bentuk, yakni: Gerakan Sosial Lama (*old social movement*), dan Gerakan Sosial Baru (*new social movement*) sebagai basis mobilisasi.

Gerakan Sosial Lama dan Baru (Old and New Social Movements)

Gerakan sosial lama (*old social movement*) sering dikaitkan dengan pendekatan Marxism. Meski secara eksplisit, pendekatan Marxism tidak banyak menyinggung istilah “gerakan” (Coburn, 2016: 237). Posisi “gerakan” pada gerakan sosial lama terpusat pada struktur, ideologi, budaya, dan perlawanan (Buechler, 1995; Fuchs, 2006; Goodwin dan Jasper, 2006; Barker, 2013). Prosedur analitis dalam memahami gerakan sosial dan revolusi tetap

membutuhkan suatu mekanisme yang disebut tindakan kolektif (*collective action*) (Barker, 2013: 89).

Sebagaimana perhatian Marxism pada kelas sosial yang kemudian menimbulkan bentuk protes sosial, ini dianggap sebagai manifestasi dari gerakan sosial (Klandermans and Roggeband, 2007: 222). Dalam pendekatan strukturalisme, gerakan sosial bermuara pada hak-hak sipil, anti-perang, kiri baru, dan aktivis buruh. Aktivitas semacam ini yang kemudian dipandang sebagai aspirasi “politik gaya lain” (Goodwin dan Jasper, 2006: 614). Sedangkan kondisi struktural dan perubahan sosial dalam gerakan sosial baru memiliki posisi yang penting (Fuchs, 2006: 103).

Gerakan sosial baru dalam beberapa literatur masih menempatkan pendekatan mobilisasi sumberdaya (*resource mobilization*) sebagai bagian pokok (Jenkins, 1983: 527). Terutama yang sering digunakan dalam teori praktis dan para pemimpin gerakan sosial (*social movement leaders*) (McCarthy dan Zald, 1977: 1213). Sebagaimana pendekatan mobilisasi sumberdaya dipengaruhi dari kontribusi pembentukan gerakan, proses mobilisasi, organisasi gerakan sosial, dan hasil dari penolakan (Jenkins, 1983: 529).

Keberadaan masyarakat pasca industri, mobilisasi sumberdaya melalui gerakan lingkungan (*environmental movement*) yang oleh Wapner (Snow, Soule, dan Kriesi, 2006: 608) menjadi gerakan perintis pembangunan masyarakat sipil global. Senada dengan itu, *Global Justice Movement* (GJM) menaruh perhatian gerakan sosial baru pada bidang lingkungan menjadi semacam keadilan sosial (*social justice*) dalam sistem demokrasi (Della Porta, 2009: 88).

Sebagai bagian tak terpisahkan dari pendekatan mobilisasi sumberdaya (*resource mobilization*), organisasi gerakan sosial (*Social Movement Organizations*) (Della Porta dan Diani, 2006: 137), perspektif tindakan kolektif tidak lepas dari studi tentang agregasi sumber daya (*aggregation of resources*) (McCarthy dan Zald, 1977: 1216). Menurut Tilly (Goodwin dan Jasper, 2006: 615) tindakan kolektif semacam itu sebagai fungsi kepentingan, organisasi, mobilisasi sumber daya, kekuasaan, represi (atau fasilitasi), dan peluang (atau ancaman).

Sedangkan dalam siklus gerakan sosial, Blumer (Della Porta dan Diani, 2006: 150) membedakan 4 (empat) tahap berupa: gejolak sosial (*social ferment*), kegembiraan rakyat (*popular excitement*), formalisasi (*formalization*), dan pelembagaan (*institutionalization*). Tahapan ini ditandai adanya agitasi tak terorganisir hingga mengkristal pada struktur gerakan sosial. Struktur tersebut menurut Tarrow dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) elemen penting, yakni: organisasi formal (*formal organization*), organisasi tindakan kolektif (*organization of collective action*), dan memobilisasi struktur (*mobilizing structure*), (Willems dan Jegers, 2012: 69).

Konsep Masyarakat Sipil

Pada kalangan akademisi memiliki perbedaan istilah mengenai masyarakat sipil (*civil society*). Seperti Nurcholis Madjid (2009: 22) lebih senang menggunakan istilah masyarakat madani yang cenderung melihat perkembangan masyarakat di Madinah. Agak berbeda apa yang dijelaskan Veltmeyer tentang masyarakat sipil. Veltmeyer (2004: 2) menjelaskan salah satu fitur paling mencolok dari wacana praktisi pembangunan adalah prevalensi dan sentralitas gagasan "masyarakat sipil". Kebangkitan gagasan masyarakat sipil ini dan reformulasi konseptualnya dapat ditelusuri di sepanjang dua jalur studi akademik: tradisi liberal yang peduli dengan dinamika proses politik dan perkembangan pemberdayaan masyarakat. Dalam wacana ini, masyarakat sipil mencakup segala macam organisasi yang ditemukan antara keluarga dan negara.

Secara fungsional masyarakat sipil yang terorganisir jauh lebih maju daripada mengisi kekosongan secara rutin. Fungsinya dapat dikategorikan secara luas sebagai berikut: (a) dukungan pasar; (b) penyediaan barang publik; (c) penyediaan barang-barang pribadi dengan barang-barang publik; (d) fasilitasi aksi politik; (e) penyediaan layanan budaya; (f) fasilitasi penentuan nasib sendiri; dan (g) fasilitasi kewirausahaan. Kategori-kategori ini mewakili dari berbagai argumen ekonomi dan sosiologis yang berusaha menjelaskan keberadaan masyarakat sipil yang terorganisir, (Garton, 2009: 41). Kategori tersebut merupakan bagian dari organisasi masyarakat sipil (OMS). OMS dapat diidentifikasi pada 8 (delapan) unsur berikut: 1) bersifat ekonomis, 2) bersifat kultural, 3) bersifat informasional, 4) berkepentingan, 5) berkaitan pembangunan, 6) berorientasi isu, 7) berorientasi civic, dan 8) berhubungan dengan "*the ideological markerplace*", (Sukmana, 2016: 213-214).

Perkembangan masyarakat sipil sejalan dengan munculnya gerakan sosial baru adalah untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat yang lebih besar, Purdue (Haunss and Leach, 2007: 72). Gerakan sosial masuk ke dalam hubungan koalisi, persaingan atau konflik dengan aktor politik lainnya, menjadi tertanam dalam rangkaian jaringan sosial dan politik yang lebih luas yang menyusun peluang dan pilihan aktivis. Masyarakat sipil yang membentuk jenis kontribusi gerakan sosial terhadap demokrasi; dan merupakan struktur sosial yang berpengaruh di lingkungan gerakan sosial yang lebih stabil daripada jaringan antarpribadi, Purdue (Haunss and Leach, 2007: 76).

Secara empiris, gerakan sosial sebenarnya hanyalah salah satu cara koordinasi tindakan kolektif yang mungkin dilakukan dalam masyarakat sipil. Keunikan mereka terletak pada penggabungan jaringan antar-organisasi yang padat dan identitas kolektif yang melampaui batas-batas organisasi mana pun dan mencakup kolektivitas yang lebih luas, Edward (Della Porta and Diani, 2011: 68). aksi kolektif dipromosikan oleh jaringan orang-orang yang berpikiran sama yang peduli dengan penyebab yang lebih luas. Akhirnya, tindakan kolektif dapat terjadi

dalam organisasi tertentu tanpa merangsang pertumbuhan jaringan dan identitas yang lebih luas.

Sedangkan Purdue (2007: 6-7) berpandangan bahwa gerakan sosial adalah elemen kunci masyarakat sipil. Gerakan sosial baru memiliki struktur jaringan yang longgar dan sering menggunakan aksi langsung sebagai alat kampanye. Di sisi lain, yang membedakan gerakan sosial dari jejaring sosial secara lebih umum adalah bahwa gerakan memiliki tujuan di luar kemampuan bersosialisasi, karena ia terlibat dalam perubahan sosial.

Pada bagian transisi demokrasi, ada sedikit penekanan pada peran masyarakat sipil dalam demokratisasi. Lingkup masyarakat sipil bagaimanapun didefinisikan sebagai aktor-aktor non-negara yang membentuk latar belakang transisi. Dengan mengklaim bahwa disposisi elit, perhitungan, dan pakta menetapkan batasan penting tentang sejauh mana kemungkinan liberalisasi dan akhirnya menjadi demokratisasi (Baker, 2002: 111).

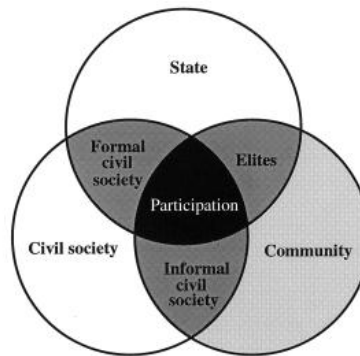
Salah satu bagian dari pembagian tiga arah antara negara, ekonomi dan masyarakat sipil adalah perdebatan yang sedang berlangsung. Secara umum mereka yang berada di kanan mengidentifikasi maraknya masyarakat sipil dengan kebebasan pasar, sementara mereka yang di kiri lebih suka melihat masyarakat sipil sebagai penyeimbang dengan kekuatan aktor ekonomi berskala besar, seperti perusahaan internasional, dan juga bagi masyarakat sipil, (Purdue, 2007: 2).

Pada bagian reformasi politik, aspek yang berpengaruh dengan masyarakat sipil adalah: 1) mengembalikan kekuasaan konstitusional sipil dan politik elektoral, 2) desentralisasi pengambilan keputusan pemerintah, 3) perampingan aparatur negara, 4) meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sebagai lokus pembangunan partisipatif, dan 5) penguatan masyarakat sipil di sektor swasta, (Veltmeyer, 2004: 8).

Hubungan masyarakat sipil dengan negara terdapat dua premis perbedaan pada masyarakat sipil formal dan informal (Davies dan Hossain, 2014: 10). Masyarakat sipil yang lebih dekat adalah dengan negara, menjadi lebih formal. Masyarakat sipil bersifat informal di mana tumpang tindih dengan komunitas tetapi tidak dengan negara. Ketika negara dan komunitas tumpang tindih, biasanya melalui partisipasi para elit.

Hubungan antara negara, masyarakat, dan komunitas terus berkembang. Perubahan institusional bergantung pada perubahan dalam negara dan masyarakat sipil, serta pada upaya eksplisit untuk mereformasi aturan di antara mereka. Masyarakat sipil informal, terdiri dari aturan dan aliansi yang kurang jelas dan kurang terlihat berdasarkan kekerabatan, kasta, kelas dan jenis kelamin yang beroperasi di dalam dan di luar rumah tangga. Aturan kelembagaan masyarakat sipil informal tidak begitu sering diubah menjadi 'pemain' organisasi seperti yang ada di masyarakat sipil formal. Sedangkan masyarakat sipil formal terdiri dari organisasi dan lembaga yang terlihat dan diakui secara hukum.

Berikut digambarkan posisi masyarakat sipil formal dan informal dengan negara.



Gambar 1: Hubungan antara negara, masyarakat sipil formal dan informal dan komunitas.

Sumber: *Livelihood Adaptation, Public Action And Civil Society*, Davies and Hossain (2014: 12).

Penelitian Terdahulu

1. M. Mawardi J., 2016, pada disertasinya yang berjudul “Perlawanan Petani terhadap Ketidakadilan Agraria Dalam Stigma Gerombolan Pengacau Keamanan (Studi Pada Masyarakat Talangsari Lampung Timur)” dengan menggunakan metode kualitatif studi kasus. Hasil penelitian menyebutkan: *pertama*, munculnya ketegangan struktural pada perlawanan petani dengan otoritas kawasan hutan register 38 Gunung balak, *Kedua*, aktor supra lokal sebagai penggerak perlawanan petani. *Ketiga*, pelabelan komunitas petani Talangsari sebagai Gerombolan Pengacau Keamananan dengan menggunakan ideologi Islam (Jihad). *Keempat*, Gerakan perlawanan atas dasar kepentingan ekonomi, dengan label gerakan keagamaan.
2. Arif Novianto; Lukman Kurniawan; dan Samodra Wibawa, 2016, pada jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan judul “Krisis Kapitalisme 2008 dan Bangkitnya Gerakan Kiri Studi Dinamika Gerakan Partai Syriza di Yunani” menggunakan pendekatan kajian literatur dan analisis kritis. Hasil penelitian ini menyebutkan krisis ekonomi sebagai momentum dari sistem kapitalisme; kekuatan gerakan kiri sebagai perlawanan dalam menentukan transformasi politik pada negara.
3. Mibtadin, 2017, pada disertasinya yang berjudul “Gerakan Sosial Masyarakat Sipil: Studi Gerakan Sosial LKiS, Fahmina, dan The Wahid Institute” menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelian menyebutkan LKiS, Fahmina, dan The Wahid Institute sebagai media gerakan sosial islam untuk penguatan sumberdaya dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan universal.

METODE PENELITIAN

Paradigma Penelitian

Paradigma dapat pula bermakna sebagai model atau pola yang diterima dalam riset ilmiah (Kuhn, 1989: 11, 25). Paradigma dalam penelitian ilmu sosial melalui trilogi konsep filosofi pengetahuan mencakup ontologi, epistemologi, metodologi, dan aksiologi (Morgan, 2007; Guba dan Lincoln, 1994). Istilah metode kualitatif yang dipakai dalam penelitian merupakan representasi dari "berbagi pemahaman tentang kenyataan" sebagai sinonim untuk paradigma (Rallis, 2003), sebagai pemandu pertanyaan penelitian (Creswell, 2010), dan paradigma sebagai aspek penyelidikan penelitian (Lincoln, 1990) (Morgan, 2007: 52).

Mengikuti penjelasan paradigma dan berdasarkan kajian teoritik, penelitian ini tergolong dalam paradigma kritis (*critical paradigm*). Pendekatan pemikiran kritis menurut Horkheimer (1972: 210) berorientasi pada individu, spontanitas, rasionalitas, dan proses hubungan kerja. Sedangkan Adorno mengadopsi gagasan dasar filsafat yang terdapat upaya "universalitas", "objektivitas", atau "totalitas". (Wilson, 2007: 59).

Paradigma tersebut dalam penelitian mengasumsikan epistemologi transaksional (di mana peneliti berinteraksi dengan informan), ontologi realisme historis, terutama yang berkaitan dengan penindasan; sebuah metodologi yang dialogis, dan aksiologi yang menghormati norma-norma budaya (Kivunja dan Kuyini, 2017; Guba dan Lincoln, 1994).

Mengikuti arah penelitian ini yang mencakup aspek pemahaman, kesadaran, hingga tindakan gerakan sosial adalah bagian penting sebagaimana Guba dan Lincoln (1994: 109) menjelaskan epistemologi, ontologi, metodologi, dan aksiologi dalam paradigma kritis. Kellner (1990: 22) menjelaskan teori kritis berakar pada "*critical activity*" yang terlibat dalam perubahan sosial. Istilah "*critique*" dalam konteks ini, melibatkan kritik terhadap pencemaran, pengolahan limbah, dan perjuangan untuk masyarakat yang lebih baik.

Secara paradigmatis, paradigma kritis mencakup penelitian kualitatif berupa wawancara terstruktur dan metode analisis (Denzin dan Lincoln, 2005: 377). Penjelasan ini menjadi pemandu penelitian, bahwa secara terjabar dapat dikategorikan dalam 2 (dua) pendekatan yakni: 1) pendekatan *critical structuralism* sebagai bentuk kajian pada konteks struktural dan struktur gerakan, dan 2) epistemologi, ontologi, metodologi, dan aksiologi sebagai langkah proses penyadaran, mobilisasi sumber daya, dan tindakan kolektif.

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Creswell (2010:1). Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini menggunakan jenis studi kasus deskriptif yaitu paparannya bersifat naratif dan menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan pertanyaan *how*, *why*, (Yin, 2009: 1).

Penelitian ini dapat ditinjau melalui realitas makro-subyektif (Ritzer, 2014). Secara rinci dapat mendeskripsikan: (1) penyebab dan alasan gerakan sosial masyarakat sipil pada kasus pabrik karet di Desa Medali, (2) proses kronologis-logis gerakan sosial masyarakat sipil pada kasus pabrik karet di Desa Medali, 3) akibat gerakan sosial masyarakat sipil pada kasus pabrik karet di Desa Medali. Penelitian studi kasus ini secara intensif menyelidiki satu atau sejumlah kecil kasus, dengan fokus banyak detail dalam setiap kasus dan konteksnya, (Neuman, 2013: 42) atau menggunakan *case study, bounded, single or collective case, event, process, program, and individual* (Creswell, 2007: 105). Adapun alasan pembatasan pada kasus tunggal, dengan pertimbangan: (1) pendalaman kasus, (2) tak banyak kasus sejenis sebagai penyeimbang, dan (3) kemenarikan kasus.

Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti memposisikan sebagai observer partisipan (bukan partisipan penuh). Peneliti memasuki wilayah Desa Medali dengan melakukan pengamatan-pengamatan. Pengamatan ini menggunakan 3 (tiga) penginderaan, yakni: (1) indera pendengaran, (2) indera penglihatan, dan (3) indera pembauan.

Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi dalam penelitian yang berada di Desa Medali Kecamatan Puri Mojokerto. Lokasi dipilih berdasarkan kemenarikan kasus, pertimbangan minat kajian gerakan sosial ini menarik untuk dikaji yang berkaitan dengan penolakan keberadaan pabrik karet oleh warga Medali. Adapun penentuan subjek penelitian ditentukan berdasarkan spesifikasi, status dan peran dari masing-masing sumber data penelitian. Sumber data dalam penelitian ini, diperoleh melalui sumber data primer dan sekunder. Dalam mendukung data penelitian beberapa subyek penelitian yang peneliti libatkan adalah Ketua MPL, Aktivis Mahasiswa (PMII), dan tokoh agama serta sebagai informan kunci adalah Kepala Desa. Setelah menetapkan subyek penelitian, peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan cara: (1) observasi, (2) wawancara/interview, (3) studi dokumentasi (Creswell, 2007).

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan berdasarkan catatan lapangan yang kemudian direduksi, dideskripsikan, dianalisis, dan ditafsirkan (Creswell, 2007: 150-152). Sebagai praktik interaktif berikut ini langkah-langkah analisis data penelitian: 1) Atur dan siapkan data-data yang akan dianalisis (data dari pengumpulan data); 2) Baca terlebih dahulu semua data. Artinya pengertian atau informasi dicermati maknanya, gagasan atau ide yang disampaikan informan, hingga kesan mendalam dari informan pada saat wawancara; 3) Mulai analisis secara rinci dengan proses

pengkodean. Dimulai dengan pengelompokan dari data sejenis. Pengkodean seperti akan mempermudah hasil dari data yang dianalisis; 4) Gunakan proses pengkodean untuk menghasilkan deskripsi pengaturan (orang, tempat, peristiwa, waktu) atau orang serta kategori atau tema untuk masuk sebagai data analisis; 5) Mulai mendeskripsikan data dengan narasi kualitatif. Diantaranya memuat diskusi yang menyebutkan kronologi kejadian, pembahasan terperinci dari beberapa tema (lengkap dengan subtema, ilustrasi khusus, berbagai perspektif dari individu, dan kutipan) atau diskusi dengan interkoneksi tema; dan 6) Langkah terakhir adalah dengan membuat interpretasi atau makna data. Dapat pula diarahkan pada esensi dari ide, yang dimungkinkan peneliti dapat menafsirkan data (Lincon & Guba dalam Creswell, 2009: 198).

Dalam menganalisis data menggunakan kualitatif (Neuman, 2013: 487), menambahkan terdapat kecocokan pada model yang dipakai Weber sebagai model ideal. Untuk mengembangkan tipe ideal dari suatu proses atau hubungan sosial dan kemudian membandingkan dengan kasus-kasus terkait. Dalam penelitian kualitatif, dapat menggunakan tipe ideal dalam dua cara, yaitu: (1) kontras terhadap konteks dan (2) analogi.

Pengecekan Keabsahan Data

Pada bagian pengecekan keabsahan data, usaha-usaha peneliti yang dilakukan diantaranya yaitu dengan menggunakan teknik perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, observasi mendalam, dan triangulasi (menggunakan beberapa sumber dan metode), (Bungin, 2003:191). Penerapan keabsahan data setidaknya mencakup: (1) triangulasi dari sumber data yang berbeda, (2) menggunakan deskripsi yang luas dan berbobot untuk menyampaikan temuan, (Creswell, 2013: 202-203). Kelayakan data penelitian dapat ditentukan berdasarkan 5 (lima) unsur, yakni: (1) *credibility*, (2) *authenticity*, (3) *transferability*, (4) *dependability*, and (5) *confirmability*, (Creswell, 2007; Yin, 2009). Konstruksi dari informasi atau konteks penelitian. dapat mengurangi ketidak-hubungan data serta berbagai persepsi untuk memperjelas makna dan interpretasi (Stake, 2003: 148).

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

Penyebab dan Alasan Gerakan Sosial Masyarakat Sipil

Sosio Kultur Masyarakat Medali

Warga Medali tergolong masyarakat yang mudah diajak komunikasi. Sosio-kultur masyarakat Medali mencakup sisi tradisi yang berkembang di lingkungan. Tradisi kehidupan sosial masyarakat Medali lebih dekat dengan nuansa keagamaan. Kegiatan keagamaan menjadi suatu pola tingkah laku yang mendorong masyarakat membangun solidaritas dan gotong royong.

Selain berperilaku sopan santun, warga Medali merupakan bagian dari penduduk Mojokerto dikenal dengan tipe yang blak-blakan, terus terang, berani, tanggung jawab, dan menjunjung solidaritas. Mencermati tipe tersebut, warga

Medali dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang terbuka terhadap orang lain. Namun, pada kondisi tertentu yang memungkinkan warga tersinggung, dikhianati, atau sikap yang tidak menyenangkan akan marah dan melakukan protes.

Nilai dan Norma Sosial Masyarakat Medali

Kehidupan sosial yang kondusif mensyaratkan penerapan nilai dan norma sosial. Keterhubungan nilai sosial terhadap norma sosial menentukan makna sosial (*social meaning*) dari tindakan. Termasuk disini adalah peran sosial (*social role*) yang merupakan produk dari norma sosial (Sunstein, 1996: 928). Nilai-nilai semacam gotong-royongan, kepedulian, kebersamaan, menunjukkan bagaimana nilai berfungsi secara fungsional. Berikutnya pada pola tindak yang menjadi nilai sosial seperti gotong royong, prasaja, musyawarah mufakat, kesatria, dan dinamis. Nilai tersebut terhadap tindakan mengandung nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Artinya nilai-nilai tersebut berguna secara fisik, aktivitas, dan batin manusia.

Warga Medali dalam kehidupan bermasyarakat memiliki 2 (dua) aturan yang mengikat yakni aturan formal dan informal (Shaefer, 2013: 65). Seturut dengan aturan formal dan informal yang berlaku di masyarakat Medali, dapat berfungsi untuk mengatur keteraturan antar warga. Dengan demikian setiap tindakan warga merupakan bagian dari upaya menertibkan kehidupan sosial masyarakat Medali. Maka, secara fungsional norma sosial yang berkembang di masyarakat dapat menjadi kontrol sosial. Norma tersebut berupa norma kesopanan, kesusilaan, dan kelaziman.

Struktur Sosial Masyarakat Medali

Struktur sosial dalam masyarakat menempatkan 2 (dua) perbedaan, yakni: diferensiasi sosial (Blau, 1977) dan stratifikasi sosial (Collins, 1975), (Turner, 1986: 426; Ritzer, 2011: 270). Keduanya memiliki dimensi masing-masing dalam masyarakat. Kasus pabrik karet yang menempatkan posisi warga dengan pengusaha pabrik tergolong dalam bentuk stratifikasi sosial (kekayaan dan kekuasaan). Jenis diferensiasi sosial dalam kehidupan warga lebih dominan pada bidang profesi dan agama. Perbedaan profesi seperti petani, pedagang, kuli, pengrajin sepatu, tukang, dan karyawan serta perbedaan agama seperti islam dan kristen tidak menjadikan masyarakat berkonflik. Justru dimensi konflik terjadi sebab stratifikasi sosial.

Mencermati dari struktur yang ada, fungsi yang secara fungsional diperlukan dalam penanganan kasus pabrik karet. Dalam struktur, fungsi memiliki status dan peran dalam menjalankan nilai-nilai sosial dan budaya. Fungsi inilah yang dapat dimaknai sebagai fungsi manifest, (Merton, 1968: 105-106). Nilai-nilai yang dianut atau nilai yang telah disepakati oleh warga masyarakat Medali, diterapkan melalui tindakan-tindakan kolektif warga terhadap pabrik karet.

Keterlibatan tokoh masyarakat tidak dapat dilepaskan dari upaya menjalankan fungsi fasilitasi, mediasi, proteksi, dan sosialisasi terhadap warga.

Pada prinsipnya, secara fungsional masyarakat digerakkan pada situasi yang seimbang atau minim konflik. Sebagaimana struktur formal (pemerintah kabupaten, pemerintah desa, DPRD) terhadap warga menerapkan yang dinamakan dengan fungsional positif. Artinya, peran yang melekat pada status dijalankan sesuai fungsinya. Seperti memberi kepastian kebijakan, pendampingan, dan rekomendasi yang diarahkan kepada kebutuhan warga masyarakat.

AMDAL dan Masalah Lingkungan

Setiap pendirian pabrik/industri mensyaratkan pemenuhan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan menyebutkan setiap usaha yang berdampak pada lingkungan wajib memiliki AMDAL. Dapat diketahui, pendirian pabrik karet yang dinaungi oleh PT. BNM (Bumi Nusa Makmur) memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan. Dampak lingkungan tersebut erat dengan limbah yang dihasilkan dari residu pabrik. Limbah yang dimaksud meliputi limbah cair, padat, dan udara.

Mencermati dari beroperasinya PT. BNM yang menimbulkan limbah, berpotensi terjadinya konflik. Hal ini tidak relevan dengan unsur pemenuhan Amdal dan peraturan tentang Amdal. Bahwa salah satu unsur pemenuhan Amdal adalah terpenuhinya RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan). Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup pasal 5 (1a) harus menyebutkan jumlah manusia yang akan terkena dampak.

Limbah yang menyebar dari dusun-dusun ke desa-desa, terus mengalami peningkatan jumlah korban. Terutama beberapa desa terdampak yang dilalui sungai dan beberapa warga yang masih bergantung pada kebutuhan air sungai dan air sumur. Warga sempat mengalami sakit yang didiagnosa terdapat pengaruh limbah karet sebagai penyebabnya.

Berikut penyebab kasus yang disampaikan oleh Kepala Desa Medali:

Informan	Penyebab Kasus
Miftahuddin/ Kepala Desa Medali	Adanya limbah berimbas pada sumber air warga (sumur), sesak nafas, gatal-gatal, dan mual-mual. Limbah tersebut menyebar dan berdampak pada kehidupan masyarakat setelah pabrik karet beroperasi secara aktif. Terhitung satu tahun usai beroperasi aktif pada 2009. Hal tersebut diketahui oleh warga saat menggunakan air sungai dan air sumur untuk kebutuhan MCK (Mandi Cuci Kakus). Secara berkala, akibat limbah menyebar dari dusun ke dusun, dari desa ke desa yang dilalui sungai (limbah cair) dan mengikuti arah angin (limbah udara)

	(W/PD/P_A/18-03-19).
Miftahuddin/ Kepala Desa Medali	Kami mengajukan uji lab pada limbah cair dan udara untuk membuktikan kandungan kimia pada karet, dan apakah limbah itu membahayakan warga. Usai uji lab dapat dibuktikan bahwa limbah tersebut mengandung senyawa yang berbahaya (W/PD/P_A/18-03-19).

Proses Kronologis-Logis Gerakan Sosial Masyarakat Sipil Mobilisasi Sumberdaya dan Tindakan Kolektif

Mengawali pembahasan mobilisasi sumberdaya (*resource mobilization*), perlu adanya penekanan faktor pendukung mobilisasi sumberdaya berupa faktor struktural, (Sukmana, 2016: 155). Proses mobilisasi sumberdaya melalui jaringan sosial berdampak pula pada pembentukan kerumunan (*crowd building*). Pembentukan kerumunan yang terorganisir dapat meningkat menjadi partisipasi. Partisipasi kolektif ini setidaknya berpengaruh pada sejumlah biaya kehilangan dan imbalan, yakni berupa: waktu, keamanan individu, dan pekerjaan. Waktu, tercurahkannya sekian paruh waktu untuk menyiapkan berbagai langkah strategis dalam menolak keberadaan pabrik karet. Sehingga waktu bersama keluarga atau aktivitas lain menjadi berkurang. Keamanan individu, salah satu resiko yang dirasakan dalam aksi massa maupun gerakan sosial berkaitan dengan keamanan individu. Seperti pada kejadian aksi massa tahun 2010, telah menjadikan beberapa massa aksi mengalami luka-luka dari perilaku baku hantam dengan pihak kepolisian. Pekerjaan, didasarkan atas kepedulian bersama ketika ada panggilan berkumpul maka pekerjaan-pekerjaan ditinggalkan untuk memenuhi panggilan tersebut, (Aqib, 05 April 2019).

Berikutnya setelah beberapa kali aksi menuntut sikap tegas dari Bupati, pada tahun 2016 dikeluarkanlah surat keputusan Bupati tentang pemberhentian ijin operasional. Usai legitimasi dari Bupati diperoleh warga, ternyata tidak mendapat tanggapan baik dari pihak pabrik karet. Konflik pada kasus ini kemudian harus diselesaikan dengan cara adjudikasi. Pihak ke-1 (warga) dan pihak ke-2 (pemilik pabrik karet) menempuh jalur pengadilan untuk menyelesaikan kasus dengan melibatkan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) di Surabaya. Selain itu, melalui dukungan solidaritas pernah membuat petisi ditandatangani oleh beberapa kepada desa sebagai wilayah terdampak, (Aqib, 05 April 2019).

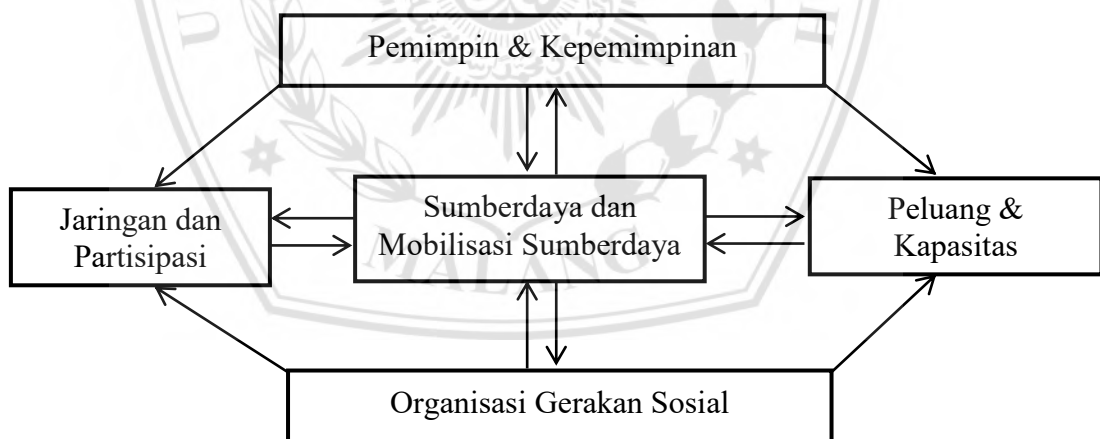
Selama proses Sidang, terdapat tokoh agama yang dirasa memiliki kemampuan dalam hal spiritual. Bekal yang diberikan kepada warga selain dzikir, terdapat beberapa bacaan seperti Hizib Nashr, Rotibul Haddad, dan Sholawat Asyghil. Bacaan tersebut dipilih karena memang bacaan tersebut digunakan untuk mengusir musuh. Langkah ini ditempuh untuk menghindari bentrok fisik sebagaimana aksi demonstrasi, (Zen, 05 April 2019).

Sumberdaya berikutnya dalam gerakan sosial ini mencakup bentuk protes sebagai evaluasi dari aksi massa adalah dengan menggunakan poster, karikatur,

buletin, dan media massa. Terdapat rapat/pertemuan yang dimaksudkan untuk menyatukan pemahaman antar warga dalam melakukan gerakan sosial. Adapun keberadaan organisasi yang dibentuk yakni MPL (Masyarakat Peduli Lingkungan). MPL secara khusus dibentuk untuk keperluan legal formal ketika ada keperluan keluar misal: persuratan, gugatan atau tuntutan ke Pemerintah Kabupaten atau instansi lain yang dituju, (Aqib, 05 April 2019).

Organisasi MPL tidak didasari oleh kepentingan politik tertentu atau organisasi yang berbentuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Posisi pemimpin dalam mobilisasi sumberdaya sebagai mobilisator serta mempengaruhi partisipasi sebagaimana posisi aktor dalam tindakan kolektif. Sumberdaya dalam kajian ini terbagi dalam 2 (dua) bentuk yakni: sumberdaya moral dan sumberdaya kultural. Kedua sumberdaya tersebut dalam praktik gerakan sosial termasuk unsur pendorong yang dilakukan pemimpin. Dalam unsur jaringan gerakan sosial merupakan bagian dari interaksi dan hubungan sosial. Jaringan gerakan sosial dimaksudkan untuk menguatkan, memberi pengaruh, serta dikenal pihak terkait. Pemimpin memiliki kemampuan mengendalikan peluang dan kapasitas masyarakat untuk menambah kekuatan dari tindakan kolektif.

Berdasarkan analisis mengenai faktor determinan mobilisasi sumberdaya, berikut ini digambarkan faktor determinan gerakan sosial dalam mobilisasi sumberdaya yang meliputi: 1) Organisasi Gerakan Sosial, 2) Pemimpin dan Kepemimpinan, 3) Sumberdaya dan Mobilisasi Sumberdaya, 4) Jaringan dan Partisipasi, 5) Peluang dan Kapasitas Masyarakat.



Gambar 1. Faktor Determinan Gerakan Sosial dalam Mobilisasi Sumberdaya

Sumber: Konstruksi penulis yang diadopsi dari Sukmana, 2016: 160-177.

Gambar 1. menggambarkan keterhubungan sumberdaya dan mobilisasi sumberdaya dengan faktor determinan lain. Faktor determinan juga memiliki keterhubungan terhadap sumberdaya dan mobilisasi sumberdaya. Pada faktor organisasi gerakan sosial dan pemimpin & kepemimpinan memiliki pengaruh pada jaringan dan partisipasi serta peluang dan kapasitas masyarakat.

Seiring upaya mobilisasi sumberdaya dari warga Medali, pihak pabrik karet memiliki kekuatan untuk mempertahankan keberlangsungan pabriknya.

Karena ada tindakan kolektif dari warga Medali, maka pihak pabrik karet menggunakan jasa preman untuk menghadapi warga Medali ketika didapati adanya protes. Seperti yang dinyatakan Kepala Desa Medali:

“Mereka telah menyiapkan jasa preman, buktinya ketika warga menghadang truk-truk melalui jalur masuk yang sudah di portal, para preman seketika itu menghadapi aksi warga yang merusak truk-truk kontainer” (Miftahudin, 18 Maret 2019).

Berdasarkan asumsi bahwa semakin besar derajat keterlibatan emosional pihak-pihak dalam suatu konflik, semakin besar kemungkinan konflik menjadi kekerasan, Simmel (Turner, 1986: 141). Derajat emosional warga Medali didukung adanya rasa solidaritas dan tindakan protes. Pernyataan ini sejalan dengan apa yang disampaikan Ketua MPL, yakni:

“Mungkin juga sudah waktunya, pada 2016 itu kemarahan warga tidak bisa dibendung lagi. Mungkin juga dari janji-janjinya pihak pabrik yang tidak ditepati. Mereka mengatakan akan mengurangi bau limbah, limbahnya tidak membahayakan dan sebagainya. Ini seperti orang yang dikekang secara psikologis ya akhirnya runtuh juga kepercayaan itu” (Aqib, 05 April 2019).

Mencermati kejadian tersebut, aktor dalam kasus ini adalah kelompok masyarakat yang secara formal dibentuk untuk kepentingan menuntut keberadaan pabrik karet. Kelompok ini adalah MPL (Masyarakat Peduli Lingkungan), yaitu unsur yang dibentuk dari internal masyarakat Medali. MPL bersama dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat bertugas mencermati konflik, menyatukan pemahaman warga atas dasar sistem nilai dan aturan yang telah lama berkembang di masyarakat.

Atas pengaruh struktur, dalam pendekatan ideologis aktor bertindak untuk memberikan penyadaran terhadap warga. Sebab, warga harus digerakkan melalui kekuatan kolektif sebagai bagian dari mobilisasi sumberdaya. Dengan demikian, secara struktur aktor memiliki peran untuk bertindak, mengatur, menimbulkan efek, dan memperoleh hasil. Peran inilah yang membuat seorang aktor menekankan sifat aktif, refleksif dari perilaku manusia.

Secara teoretik, apa yang dilakukan aktor adalah untuk membentuk dan mereproduksi bagian struktural dari sistem sosial (Giddens, 2009: 39). Dengan demikian, aktor dalam mereproduksi bagian struktural mencakup beberapa hal, meliputi: resosialisasi nilai dan norma, status dan peran, institusi sosial, organisasi sosial, dan kehidupan berkelompok. Adanya pencemaran limbah pabrik tentu memicu cara berpikir dan bertindak dari warga. Sebab warga Medali tidak memiliki masa lalu atau pengalaman sejenis terkait pencemaran limbah pabrik karet. Kasus pencemaran limbah karet menjadi pengalaman baru bagi warga Medali yang memungkinkan untuk melakukan kontrol sosial pada nilai dan norma tertentu.

Pada bagian status dan peran, kedudukan Kepala Desa memiliki peran melaksanakan pembinaan masyarakat desa seperti menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa (Pasal 26 (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa). Ketua MPL memiliki peran mengorganisir dan memfasilitasi warga dalam melakukan gerakan sosial. Tokoh masyarakat pada bidang keagamaan, maka memiliki peran memberi bekal spiritual pada warga, (Aqib, 05 April 2019).

Keterlibatan aktor dalam memobilisasi sumberdaya merupakan bagian penting dari tindakan kolektif. Seperti pada kasus warga dengan pabrik karet, beberapa hal yang menjadi penentu utama tindakan kolektif adalah: 1) organisasi, 2) interes, peluang atau ancaman, dan kemampuan kelompok menyikapi represi atau fasilitasi. Organisasi yang dibentuk semacam MPL adalah organisasi yang bersifat kultural, informasional dan edukasional, *interest*, berorientasi isu, dan berhubungan dengan kelompok pemikir sebagai basis pembentuk ideologis (Sukmana, 2016: 55-56).

Interes atau kepentingan dari tindakan kolektif warga medali adalah memberi pengaruh antar warga untuk mencapai target penutupan atau pemberhentian ijin operasional pabrik karet. Berikutnya, peluang yang diambil dalam tindakan kolektif adalah berbagai kemungkinan yang ditempuh untuk mencapai target seperti akses dukungan komisi C DPRD, SK Bupati, penutupan portal jalan masuk truk kontainer, hingga sidang di PTUN. Sedangkan ancaman yang dilakukan warga dalam menyikapi represi dari pihak pabrik karet adalah untuk memecah kekuatan warga ketika melakukan aksi. Ancaman tersebut dapat berupa pemberian sumbangan atau kedudukan tertentu bagi stakeholder dengan tujuan mempengaruhi warga agar tidak menuntut penutupan pabrik, (Aqib, 05 April 2019).

Gerakan Sosial Masyarakat Sipil

Mencermati dari situasi sosio kultur, struktur sosial, serta masalah lingkungan yang dilakukan pabrik karet menuai perhatian serius dari warga Desa Medali. Kondisi sosio kultur masyarakat Medali lekat dengan nuansa paguyuban (*gemeinschaft*), (Tonnies, 2001: 22). Paguyuban dalam masyarakat Medali lebih dekat pada hubungan kekeluargaan, hubungan informal antar warga, dan upaya membina persatuan. Menyambung dari kehidupan paguyuban, masyarakat desa termasuk Desa Medali masih tergolong dalam masyarakat dengan ciri solidaritas mekanik.

Durkheim menyebut solidaritas mekanik sebagai kohesi sosial. Dia berpendapat bahwa mempromosikan solidaritas mekanik tergantung pada sejauh mana kehidupan masyarakat dipeluk dan diatur oleh hati nurani yang sama. Solidaritas mekanis paling kuat jika ide-ide yang umum untuk semua anggota kelompok lebih besar daripada yang dimiliki oleh masing-masing anggota, (Young, 1962: 24).

Masyarakat desa dengan ciri paguyuban dan solidaritas mekanik, dapat menerima dan mendukung suatu kepentingan bersama. Pemenuhan kepentingan bersama manakala seorang kepala desa dapat memenuhi hak, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawabnya. Dalam konteks penelitian ini, hak yang dimiliki melekat pada kewajiban yang harus ditaati serta wewenangnya terikat pada tanggungjawab yang harus dipenuhi.

Partisipasi warga secara penuh menjadi pilihan taktis gerakan sosial. Tindakan kolektif dapat terlaksana setidaknya ada keterlibatan warga secara menyeluruh. Keterlibatan warga dipengaruhi oleh upaya penyadaran dan kemudian menimbulkan tindakan kolektif. Kesadaran yang mengarah pada kesadaran kolektif dipengaruhi oleh: 1) interes/kepentingan, 2) isu, 3) pengalaman individu, 4) organisasi, dan 5) mobilisasi. Sedangkan wadah untuk membentuk kesadaran tersebut dapat berupa keajekan bertemu, rapat, dzikir, dan doa bersama. Kepentingan warga yang terhimpun dalam beberapa rangkaian kegiatan adalah taktik agar mendapat dukungan dan keberpihakan pada warga. Dengan menggunakan isu, cukup efektif untuk meyakinkan warga agar tercipta kesadaran bersama. Dampak limbah pabrik karet di kawasan Desa Medali memberi pengalaman tersendiri bagi warga yang menjadikan warga harus bertindak dari kondisi yang menimpanya, (Miftahudin, 18 Maret 2019).

Gerakan sosial baru memandang bahwa logika aksi didasarkan pada politik, ideologi, dan budaya sebagai akar dari banyak aksi kolektif (Buechler, 1995: 442). Selain tindakan sosial, gerakan sosial baru menggunakan pendekatan mobilisasi sumberdaya (Fuchs, 2006: 103). Gerakan sosial melalui tindakan kolektif maupun mobilisasi sumberdaya berpengaruh pada perubahan masyarakat. Ketercapaian perubahan masyarakat pada gerakan sosial menurut Locher ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yakni: 1) *leadership: effective leadership* (kepemimpinan: kepemimpinan yang efektif); 2) *image: positif image* (citra: citra positif); 3) *support: cultivated financial and political support* (dukungan: pembudayaan dukungan politik dan finansial); 4) *(tactics: socially accepted tactics* (taktik: taktik yang dapat diterima secara sosial); 5) *goals: socially acceptable goals* (tujuan: tujuan yang dapat diterima secara sosial) (Sukmana, 2016: 22-24).

Unjuk Rasa/Demonstrasi

Dalam demonstrasi, keterlibatan massa menjadi faktor pendorong serta kekuatan gerakan. Sebagai suatu bentuk ideal, demonstrasi diatur dan diorganisir melalui manajemen aksi. Secara teknis, dalam tahapan aksi disusun dan disepakati adanya perangkat aksi yang mencakup: koordinator lapangan (korlap), orator, humas, dan negosiator. **Korlap** memiliki posisi sentral dalam aksi massa yang dapat memberikan instruksi dan mengatur seluruh massa aksi yang terlibat. **Orator** memiliki tugas menyampaikan tuntutan dengan bahasa orasi. **Humas** memiliki tugas untuk menjalin interaksi dan komunikasi dengan beberapa kelompok kepentingan seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Negosiator dalam aksi memiliki tugas mengkomunikasi tujuan aksi untuk mencapai kesepakatan dengan kelompok kepentingan.

Berdasarkan aksi dan tuntutan, antara tahun 2010-2011, warga sudah mengantongi rekomendasi atas diberhentikannya ijin operasional pabrik karet dari komisi C DPRD Kabupaten Mojokerto. Rekomendasi tersebut masih terkesan lemah untuk menghadapi kekuatan pengusaha pabrik karet. Meski demikian, warga tak putus asa melakukan unjuk rasa. Pada kisaran Bulan Januari 2011 unjuk rasa ketiga dilakukan dengan dibuat sedikit chaos yang dimulai tuntutan penutupan gorong-gorong. Demonstrasi tetap berlanjut sampai tahun 2012, (Miftahudin, 18 Maret 2019).

Semula, demonstrasi yang dilakukan warga pada tahun 2010-2012 tidak mendapat dukungan dari Pemerintah Desa Medali. Unjuk rasa tersebut dilatarbelakangi pada kepedulian lingkungan yang terganggu adanya limbah pabrik. Warga yang merasa kenyamanannya terganggu, berkumpul dan berdiskusi yang kemudian menghasilkan kesepakatan untuk melakukan tuntutan dengan cara unjuk rasa. Sampai pada tahun 2013-2015 aksi unjuk rasa terhenti sementara diganti dengan bentuk penyampaian tuntutan menggunakan surat terbuka kepada Pemerintah Daerah. Tahun 2013 terjadi peralihan kepemimpinan Kepala Desa Medali. Kepala Desa yang terpilih merupakan orang yang menggagas adanya MPL serta orang yang menggerakkan warga dalam melakukan aksi massa pada tanggal 18 Januari 2011, (Aqib, 05 April 2019).

Pada tanggal 18 Januari 2011, unjuk rasa dari warga Medali dilakukan di depan Pendopo Kabupaten Mojokerto. Terdapat 4 (empat) truk besar dan 2 (dua) *pick up* ukuran sedang yang berisi massa aksi. Unjuk rasa dikawal oleh sejumlah polisi yang berada pada sekitar lingkaran aksi. Dalam unjuk rasa tersebut terdapat orator, koordinator lapangan (korlap), negosiator, dan massa aksi. Korlap dan negosiator didampingi oleh pihak pemerintah daerah berusaha menemui Bupati di ruang kerjanya untuk dapat menemui massa aksi. Pada saat itu Bupati ternyata tidak berada di ruang kerja. Atas himbauan korlap dan negosiator, massa aksi diharap mundur dan tidak melanjutkan aksi. Namun dalam unjuk rasa tersebut sempat terjadi baku hantam antara massa aksi dengan polisi. Sebab, merasa kecewa aksi yang menuntut penutupan pabrik karet tidak mendapat respon baik dari pemerintah daerah, (Miftahudin, 18 Maret 2019).

Bila dicermati dari unjuk rasa yang dilakukan pada 2011, dianggap sebagai aksi yang belum berhasil. Termasuk unjuk rasa serupa pada tanggal 25 Nopember 2010 yang dilakukan di sekitar pabrik karet. Seturut dengan itu Kepala Desa terpilih yaitu Miftahudin memiliki target dan tujuan bersama dalam menyelesaikan masalah pabrik karet. Hasil wawancara dengan Miftahuddin pada (18/03/19) bahwa berdasarkan pengalaman melakukan unjuk rasa dengan beberapa warga dirasa belum efektif. Pada tahun 2016, dirancang dan disiapkan beberapa aksi sebagai taktik gerakan sosial. Taktik tersebut meliputi: 1) MPL

sebagai pusat gerakan, 2) lobbying dengan pihak hukum, 3) setting aksi (simbolik, protes, media), dan 4) penataan dan penggerakan massa.

Dengan demikian pada forum audiensi, berdasarkan studi dokumentasi pada (10/12/16), pihak warga yang diwakili oleh Kepala desa dan Masyarakat Peduli Lingkungan (MPL) menyampaikan beberapa hal seperti: 1) tuntutan ditutupnya pabrik karet kepada pemerintah Kabupaten Mojokerto, 2) mempertanyakan kembali ijin pendirian pabrik dan AMDAL.



Gambar 2: Kepala Desa bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto

Sumber: Arsip dokumentasi Kepala Desa Medali

Pada kesempatan ini Pemerintah Kabupaten Mojokerto melakukan tinjauan lapangan di lokasi pabrik karet. Bupati melihat proses pengolahan karet, dan pembuangan limbah. Dari tinjauan tersebut, Bupati mencatat ada masalah yang sudah mengarah pada bentuk pelanggaran, yakni: 1) pelebaran lahan tanpa ijin, 2) masalah pembuangan limbah. Atas dasar tinjauan tersebut dan telah dilakukan rapat dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, maka melalui Surat Keputusan (SK) Bupati No 188.45/792/HK/416-012/2016 telah mencabut SK Bupati No 188.45/1380/HK/416-012/2008 tentang Izin Gangguan Pendirian Perusahaan Industri Karet dan Plastik serta Barang-barang dari Karet dan Plastik PT BNM.

Langkah berikutnya yang ditempuh tokoh masyarakat mengarah pada jangkauan akses kepada legislatif (DPRD) dan eksekutif (pemerintah daerah). Akses ini dimanfaatkan karena dapat mendukung secara legal formal. Seperti yang pernah dilakukan pada 2011, rekomendasi dari komisi C DPRD Kabupaten Mojokerto. Seiring berjalannya dua kepentingan (warga dan pengusaha pabrik karet), rekomendasi tersebut tidak cukup memberikan legitimasi pada berhentinya pabrik karet. Pada tahun 2016, komisi C DPRD Kabupaten Mojokerto mengeluarkan rekomendasi kembali terhadap warga Medali. Secara otomatis rekomendasi sebelumnya (2011) dinyatakan batal dan tidak dapat digunakan. Sedangkan akses kepada Pemerintah Daerah Mojokerto adalah tuntutan agar segera dikeluarkan keputusan Bupati terhadap pemberhentian ijin operasional pabrik karet, (Miftahudin, 18 Maret 2019).

Sejalan dengan strategi yang dilakukan untuk mendukung peran kepemimpinan dan pembangunan citra yakni dengan melibatkan media massa, pamflet, poster, baleho, dan spanduk yang berisi tuntutan terhadap pabrik karet. Media massa seperti Jawapos Radar Mojokerto yang memberitakan kejadian-kejadian yang dilakukan warga medali terhadap pabrik karet, (Miftahudin, 18 Maret 2019). Beberapa jenis pamflet, poster, baleho, dan spanduk dipasang di beberapa titik yang memungkinkan warga atau orang melihat untuk memperhatikannya. Titik-titik tersebut seperti di pertigaan atau perempatan jalan, sekitar balai desa, dan lokasi terdekat dengan pabrik karet. Adapun poster dan karikatur dipasang menggunakan beberapa desain, simbol seperti binatang buas, keserakahan, kapitalis, kekuasaan. Taktik atau strategi berikutnya adalah dengan membangun kesadaran warga melalui diskusi, doa bersama, audiensi. Diskusi dan doa bersama dilakukan secara berkelanjutan dengan keliling desa yang mana waktu dan tempatnya disepakati melalui pertemuan yang saat itu dilaksanakan, (Andre, 10 Maret 2019).

Gerakan sosial yang terjadi di Desa Medali meliputi keterlibatan tokoh masyarakat bidang keagamaan yang memiliki peran mengakomodir warga untuk berkumpul dalam kegiatan tahlil, istighosah, dan doa bersama ini yang biasa disebut kepemimpinan agama. Kepemimpinan berikutnya adalah kepemimpinan yang mengatur dan menyusun strategi dalam melakukan penolakan terhadap pabrik karet. Kepemimpinan ini kemudian menjalin komunikasi ke berbagai pihak yang berpotensi menambah kekuatan warga Medali dan desa sekitarnya. Tindakan tokoh masyarakat dalam gerakan ini adalah dengan memperhatikan masalah utama yakni limbah karet. Citra yang dibangun meliputi: 1) membangun kepercayaan antar sesama warga; 2) membangun ketidakpercayaan dari cara-cara yang dilakukan pengusaha pabrik dalam mempengaruhi warga Medali.

Sebagai bentuk gerakan sosial yang didominasi oleh kekuatan warga (*people power*), pendanaan atau semacam dukungan finansial dikoordinir oleh warga sendiri. Dengan menunjukkan sikap tidakbergantungan pada pihak-pihak yang memiliki pendanaan atau dalam istilah kepentingan terselubung disebut sebagai aksi bayaran. Hal demikian tidak ditempuh atau tidak digunakan oleh warga Medali untuk menambah kekuatan legitimasi warga setempat. Justru manakala menempuh cara demikian kecurigaan antar warga semakin meningkat. Ketidakterlibatan kelompok luar (*out-group*) menjadikan gerakan sosial mendapat dukungan dari dalam. Dukungan tersebut ditandai dengan keterlibatan warga baik remaja, dewasa (laki-laki dan perempuan).

Taktik dan Partisipasi dalam Penutupan Pabrik Karet

Secara teoretik, terdapat pula pendekatan gerakan sosial dilihat dari perspektif karakteristik, siklus, dan struktur. Pada gerakan sosial baru (*new social movement*) secara praktis menempatkan mobilisasi sumberdaya (*resource mobilization*) dalam organisasi gerakan sosial (*Social Movement Organizations*) (Della Porta dan Diani, 2006: 137). Begitu pula menempatkan tindakan kolektif

(*collective actions*) untuk menggeser gerakan sosial lama (Buechler, 1995: 442). Perspektif tindakan kolektif tidak lepas dari studi tentang agregasi sumber daya (*aggregation of resources*) (McCarthy dan Zald, 1977: 1216).

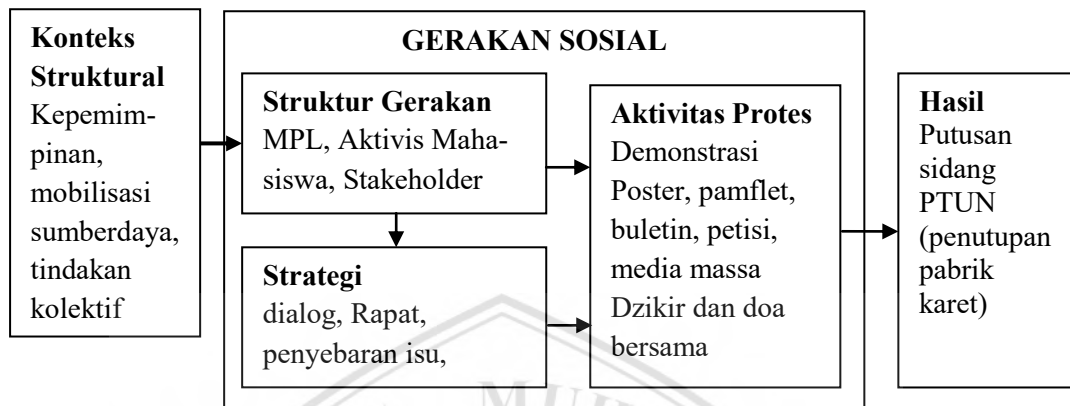
Pendekatan agregasi sumber daya memberikan pentingnya keterlibatan konflik sosial. Kaitannya dengan tindakan kolektif, diperlukan sejumlah biaya, tenaga kerja, dan imbalan dalam menjelaskan keterlibatan individu dan organisasi dalam kegiatan gerakan sosial. Biaya, tenaga kerja, dan imbalan dipengaruhi secara terpusat oleh struktur masyarakat serta memiliki cakupan pada keberhasilan dan kegagalan gerakan (McCarthy dan Zald, 1977: 1216). Menurut Tarrow (Willems dan Jegers, 2012: 69) terdapat 3 (tiga) elemen penting dalam struktur gerakan sosial, yakni: organisasi formal (*formal organization*), organisasi tindakan kolektif (*organization of collective action*), dan memobilisasi struktur (*mobilizing structure*).

Gerakan sosial secara basis ideologi merupakan ciri refleksi, kesadaran, dan keyakinan (Sargent, 1986: 3-5). Refleksi secara tindakan (*action*) merupakan evaluasi dari gerakan sosial yang dianggap kurang efektif dan tidak mengarah ke pokok kasus. Pada bagian kesadaran, warga dikumpulkan dan dilakukan pemahaman bersama. Kesadaran tersebut kemudian berbuah menjadi kesadaran kolektif yang merupakan pengaruh dari struktur. Sedang dari ciri keyakinan merupakan pemantaban melalui pelibatan dalam gerakan sosial. Warga memang harus dilibatkan untuk mengetahui fakta dan menguatkan keyakinan.

Terdapat beberapa cara yang dilakukan dalam gerakan sosial ini meliputi unjuk rasa, kritik sosial (berupa poster, pamflet, buletin, petisi, media massa). Cara ini identik dengan bentuk perlawanan terbuka. Langkah tersebut tak terpisahkan dari kepemimpinan kolektif yang merupakan unsur dari Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Ketua MPL, Karang Taruna, dan Aktivis Mahasiswa (PMII). Pengaruh dari kepemimpinan kolektif berdampak pada partisipan gerakan sosial. Partisipan tersebut meliputi kalangan anak-anak, remaja, dewasa, dan tua baik laki-laki maupun perempuan. Dengan keterlibatan warga sebagai partisipan, menunjukkan bahwa terdapat musuh bersama (*common enemy*).

Menurut Basrowi & Sukidin (2003: 89-90) terdapat 3 (tiga) bentuk gerakan pada masyarakat pedesaan, yakni: 1) gerakan tradisional, 2) transisional, dan 3) modern. Gerakan tradisional ini adalah pembentukan solidaritas bersifat komunal berupa *milénarisme* (Basrowi & Sukidin, 2003: 90). *Milénarisme* dikemas dalam bentuk kegiatan keagamaan yang berpotensi membangun keterikatan antar sesama warga. Gerakan transisional menunjukkan reaksi perubahan dari warga. Artinya, warga tidak berlaku liar (melakukan sesuatu tanpa aturan) dalam melakukan gerakan sosial. Dalam gerakan modern warga didorong untuk masuk dalam gerakan yang terorganisir. Dengan dibuatnya MPL, persiapan manajemen aksi, keterlibatan tokoh dan stakeholder menandai bahwa gerakan ini merupakan gerakan yang direncanakan dan disengaja.

Berikut dapat digambarkan proses kronologis logis gerakan sosial yang mencakup unsur konteks struktural (*structural context*), struktur gerakan (*movement structure*), strategi (*strategy*), aktivitas protes (*protest activities*), dan hasil (*outcome*).



Gambar 3. Proses Kronologis-Logis Gerakan Sosial

Sumber: Konstruksi Penulis yang diadopsi dari Pemikiran McAdam, McCarthy, dan Zald, 1996.

Gambar 3. Unsur kunci dalam gerakan sosial berpotensi pada tingkat keberhasilan gerakan. keterlibatan pemimpin serta antusiasme tindakan kolektif berimplikasi pada hasil (*outcome*) gerakan. Hal ini sejalan dengan keterhubungan struktur gerakan, strategi, dan aktivitas protes.

Fenomena gerakan sosial yang dilakukan masyarakat sipil selain pada bidang ekonomi juga kritik pada pembangunan. Pembangunan yang selaras dengan penelitian ini adalah pada bidang industri (korporasi). Sebagai bahan perbandingan, terdapat protes warga pada pembangunan pabrik seperti pegunungan Kendeng yang dijadikan pabrik semen, pembangunan NYIA di Jogja, serta di wilayah Mojokerto sendiri yakni pencemaran limbah pabrik di Lakardowo.

Sejalan dengan fenomena gerakan sosial di Desa Medali, MPL yang terhimpun dan melalui solidaritas seluruh elemen masyarakat sebagai bagian dari struktur gerakan menjadi bagian penting pula dalam mobilisasi sumberdaya. Tindakan yang dilakukan MPL merupakan bentuk dukungan aparatus sipil. Dilihat dari upaya memobilisasi sumberdaya dan melakukan tindakan kolektif, MPL dapat digolongkan dalam bentuk masyarakat sipil informal. Bentuk ini merujuk pada elemen komunitas yang lebih terorganisir.

Secara demokratis, aspek yang cukup berbeda pada gerakan sosial masyarakat sipil di Desa Medali adalah dukungan dan keterlibatan kepala desa. Pada umumnya kasus yang menyangkut pembangunan industri melibatkan pihak birokrasi dan korporasi untuk memperoleh dukungan. Unsur demokratis gerakan sosial di Desa Medali adalah melibatkan warga dalam agenda-agenda pertemuan,

rapat, dan aksi. Termasuk faktor penentu gerakan sosial yakni keberpihakan kepala desa (sebagai unsur aparatus negara) kepada warganya.

Akibat Gerakan Sosial Masyarakat Sipil

Dapat dicatat selama protes keberadaan pabrik karet secara kronologis adalah sebagai berikut: 1) keluhan dan protes warga pada limbah karet, 2) aksi massa di kantor pemerintah Kabupaten Mojokerto dan di depan pabrik karet, 3) rekomendasi dari komisi C DPRD Kabupaten Mojokerto, 4) kajian „bahaya limbah B3“, 5) rapat dengan warga, 6) keputusan Bupati Mojokerto terkait pencabutan ijin operasional pabrik karet, 7) dzikir dan doa bersama, 8) penandatanganan kesepahaman dan kesepakatan antar stakeholder, 9) protes terbuka (penggunaan poster, baliho, media massa, karikatur, buletin), 10) mengawal sidang di PTUN, dan 11) menerima hasil putusan sidang di PTUN. Sebelas hal tersebut sejalan dengan tanggungjawab Kepala Desa dalam mejamin, memfasilitasi, dan mengayomi kepentingan warga. Termasuk di dalamnya adalah mengurangi bentrok fisik dengan para preman atas dasar evaluasi akibat bentrok fisik dengan satpol PP, (Aqib, 05 April 2019).

Terdapat aspek kondusifitas struktural yang merupakan proses pembentukan dan penetapan kedudukan sosial (*social status*) dan peranan (*role*) tertentu dari struktur sosial yang dapat memfasilitasi atau menghambat munculnya jenis perilaku kolektif tertentu, (Ritzer, 2011: 171). Kedudukan sosial pada penelitian ini dipimpin oleh Kepala Desa Medali yang menjalankan status dan peranan sesuai kedudukannya. Hal ini selaras dengan upaya memobilisasi sumberdaya yang meningkat pada tindakan kolektif.

Sebagai akibat keterlibatan kepala desa dalam gerakan sosial pada penolakan pabrik karet dapat diidentifikasi dengan 4 (empat) legitimasi yang melekat, yakni: 1) legitimasi sosial, 2) legitimasi politik, 3) legitimasi hukum, dan 4) legitimasi etik. Legitimasi sosial dapat ditandai dengan berpengaruhnya atau diterimanya Kepala Desa Medali bagi warga. Manakala berpengaruh kepada warganya, maka dapat dikenal sebagai kepala desa yang peduli terhadap warganya. Legitimasi politik dimulai dari mencalonkan diri sebagai kepala desa. Kemudian dipilih warga melalui pemilihan kepala desa (pilkades). Miftahudin yang terpilih sebagai Kepala Desa Medali tahun 2013 adalah yang sebelumnya telah membentuk MPL sebagai wadah protes warga pada pabrik karet. Legitimasi hukum adalah ditetapkannya Miftahudin sebagai Kepala Desa Medali dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Mojokerto. Legitimasi etik yakni pemenuhan tugas dan tanggungjawab kepala desa sesuai janji politiknya saat kampanye sebagai calon Kepala Desa Medali. Tugas dan tanggungjawab itu yang utama adalah menyelesaikan masalah yang dilakukan pabrik karet.

Betapa penting peran agen-agen kontrol sosial dan aktor-aktor lain dalam membentuk evolusi perilaku kolektif dan bentuk-bentuknya. Langkah yang ditempuh melalui mobilisasi individu, pengorganisasian kelompok organisasi, dan

tindakan kolektif secara masif. Proses ini dapat dikategorikan sebagai bentuk evolusi perilaku kolektif atas penerimaan norma baru dari norma lama. Penerimaan norma ditandai dari pra dan pasca kejadian (belum ada dan adanya keberadaan pabrik karet). Sedang pada gerakan protes terdapat penerimaan pengalaman melakukan gerakan sosial yang tidak pernah dilakukan sebelumnya selain pada kasus ini.

Masa 8 (delapan) tahun (2010-2017) adalah rangkaian kejadian genting yang dapat ditandai dari penyebab atau akar masalah, kronologi dan penanganan masalah, dan akibat masalah. Kronologi dan penanganan masalah dapat berupa pengorganisasian masyarakat massa, penentuan dan pengawalan isu, ijin pelaksanaan unjuk rasa pada pihak terkait, penyampaian tuntutan, penyampaian kasus, penetapan kasus, dan hasil pengkajian kasus. Melalui kronologi tersebut, terdapat 2 (dua) akibat yakni berupa kerugian dan keberhasilan. Berpegang pada rasa solidaritas, kepedulian, ungkapan ketidakpercayaan, serta kesadaran menentukan gerakan sosial sebagai langkah panjang pencapaian tujuan dapat dikategorikan dalam sikap „berprinsip“.

Mengacu pada sebelas proses yang dilalui dalam penolakan pabrik karet tidak hanya melalui adu fisik, namun juga berbasis ideologis. Secara ideologis terdapat pertentangan 2 (dua) ideologi yang bertolak belakang yakni ideologi kapitalis dan environmental. Ideologi kapitalis cenderung pada pemenuhan keuntungan. Ideologi kapitalis ini merupakan salah satu perhatian dalam gerakan sosial lama. Sedangkan ideologi environmental merupakan salah satu bidang perhatian gerakan sosial baru. Model gerakan sosial baru tidak terjebak pada ide revolusi yang secara terang-terangan bertujuan menggulingkan sistem pemerintahan negara, (Sukmana, 2016: 9-10).

Tak hanya akibat ideologis, unsur mobilisasi sumberdaya dan tindakan kolektif dapat memberi pengalaman gerakan sosial pada warga Medali. Pengalaman tersebut dapat dicermati melalui 2 (dua) unsur dalam proses memobilisasi sumberdaya, yakni manusia dan administratif/materiil. Unsur manusia berpotensi lebih besar dalam tindakan kolektif dibanding unsur administratif/materiil. Namun demikian, unsur administratif/materiil tetap menjadi penting untuk keperluan tindakan kolektif. Tindakan kolektif sesuai proses mobilisasi sumberdaya ini adalah rangkaian kejadian penting dalam keberhasilan gerakan sosial.

Keberhasilan dan keberlangsungan tindakan kolektif diprasyarati oleh keberhasilan pemimpin dalam menggerakkan orang lain dan mengarahkan sumberdaya yang bisa diperoleh. Keberhasilan dalam menggerakkan orang lain berkontribusi lebih penting dibanding mengarahkan sumberdaya. Kesungguhan dan keberhasilan pemimpin dalam menggerakkan sumberdaya dan orang lain diprasyarati oleh kapabilitas sosial dan hubungan politis antara pemimpin dengan orang lain/yang dipengaruhi/partisipan gerakan.

Keberhasilan gerakan sosial masyarakat sipil melalui mobilisasi sumberdaya dan tindakan kolektif memperoleh dukungan dari aparatus negara di tingkat bawah (kepala desa). Dukungan kepala desa memberi mendorong semangat warga untuk terlibat penuh dalam gerakan sosial. Tindakan kepala desa dibuktikan dengan keterlibatan secara penuh dengan memposisikan diri di garis depan dalam melakukan gerakan sosial. Keterlibatan kepala desa dalam gerakan sosial masyarakat sipil menunjukkan ketidakberpihakan terhadap kepentingan pihak pabrik karet (korporasi). Dengan demikian, keberhasilan gerakan sosial melalui dukungan dan keterlibatan warga, masyarakat sipil, dan kepala desa.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan berikut adalah analisis dari hasil penelitian berdasarkan kajian kepemimpinan, mobilisasi sumberdaya, tindakan kolektif, dan gerakan sosial. Kesimpulan ini merupakan jawaban dari rumusan masalah dan tujuan penelitian, yakni: penyebab dan alasan gerakan sosial masyarakat sipil; proses kronologis- logis gerakan sosial masyarakat sipil; dan akibat gerakan sosial masyarakat sipil. Pemimpin yang didasarkan pada kepemimpinan kepala desa dalam gerakan sosial (*social movement*) secara praktis menempatkan mobilisasi sumberdaya (*resource mobilization*) dan tindakan kolektif. Terdapat 3 (tiga) elemen penting dalam struktur gerakan sosial, yakni: organisasi (*organization*), memobilisasi struktur (*mobilizing structure*), dan tindakan kolektif (*collective action*). Sebagai pemimpin gerakan sosial, kepala desa dihadapkan pada 3 (tiga) kepentingan yakni: pengusaha pabrik karet, pemerintah daerah, dan warga Medali. Keberpihakan terhadap warga Medali merupakan keputusan kepala desa yang dalam hal ini adalah pejabat desa. Berdasarkan legitimasi etik, keberpihakan kepala desa dapat dibenarkan yang sesuai dengan tugas dan tanggungjawab kepada warganya.

Dari perbandingan ideologi, pihak pabrik karet cenderung menggunakan ideologi kapitalis yang fokus pada keuntungan dan mengabaikan lingkungan. Ideologi kapitalis cenderung pada pemenuhan keuntungan. Ideologi kapitalis ini merupakan salah satu perhatian dalam gerakan sosial lama. Sedangkan ideologi environmental merupakan salah satu bidang perhatian gerakan sosial baru. Gerakan sosial baru memandang bahwa logika aksi didasarkan pada politik, ideologi, dan budaya sebagai akar dari banyak aksi kolektif. Kesungguhan dan keberhasilan pemimpin dalam menggerakkan sumberdaya dan orang lain diprasyarati oleh kapabilitas sosial dan hubungan politis antara pemimpin dengan orang lain/yang dipengaruhi/partisipan gerakan.

Saran/Rekomendasi

Pada penelitian ini, Kepala Desa berserta warga Medali telah membuktikan melalui gerakan sosial terhadap pihak pabrik karet berujung pada

penutupan pabrik karet. Berbagai upaya dilakukan warga seperti meminta rekomendasi dari DPRD; membuat petisi dan menyurati Bupati; bentrok dengan polisi dan preman; demonstrasi; penggunaan media massa, poster, bulletin, dan pamflet; dzikir dan doa bersama, dan sidang di PTUN. Berdasarkan langkah yang ditempuh warga Medali tersebut, beberapa rekomendasi setidaknya ditujukan kepada: 1) Kepala Desa Medali dan Warga Medali, 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto/Bupati, 3) Polisi, dan 4) Hakim Sidang. *Pertama*, Kepala Desa Medali dan Warga Medali. Kendati telah tercapai tujuan penutupan pabrik karet, tetap perlu mewaspadai keberadaan pabrik karet tersebut. Tentu pihak pabrik karet memiliki jejaring kepentingan lebih kuat yang sewaktu-waktu dapat mengaktifkan lagi pabrik tersebut. Sebab keberadaan pabrik tersebut hanya ditutup, tidak dilakukan pembongkaran bangunan.

Kedua, Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto/Bupati. Tentu Bupati dihadapkan oleh berbagai kepentingan, namun mengikuti koridor fungsi pejabat daerah kepentingan yang utama adalah memiliki keberpihakan pada warga. Terlebih Bupati mengetahui adanya ketidakberesan selama pabrik karet beroperasi. *Ketiga*, Polisi. Sebagai pihak yang bertugas menjaga keamanan tentu manakala terjadi *chaos*, polisi akan bertindak untuk mengamankan orang yang membuat *chaos*. Tidak justru terlibat baku hantam dengan massa aksi. Kondisi ini akan memperparah keadaan serta menimbulkan banyaknya korban. *Keempat*, Hakim Sidang. Hal yang paling pokok dimiliki hakim adalah sikap adil. Dengan mempertimbangkan azas kemaslahatan, kelestarian serta mempertimbangkan gugatan dan pembelaan dari pemohon dan termohon. Maka, urusan yang menyangkut kemaslahatan dan kelestarian lebih penting untuk memberikan putusan sidang. Saran tersebut dimaksudkan agar terjalin hubungan yang harmonis antar berbagai pihak. Sehingga terbangun kerukunan, kenyamanan, kelestarian, kepedulian lingkungan, serta terbangun sikap keadilan dari pejabat pemerintah.

Berikutnya, sebagai peneliti, saya memberi penekanan bahwa gerakan sosial masyarakat sipil di Desa Medali merupakan model gerakan sosial yang ideal. Artinya selain terdapat dukungan aparat negara (kepala desa), gerakan sosial ini tercapai sesuai tujuannya. Demikian pula, model gerakan sosial semacam ini dapat dijadikan referensi bagi para pegiat dan pejuang gerakan sosial berkenaan dengan perbenturan dengan pihak korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Baker, Gideon. 2002. *Civil Society and Democratic Theory: Alternative Voices*. New York: Routledge.
- Barker, Colin. 2013. *Marxism and Social Movement*. Leiden: Brill Press.
- Basrowi & Sukidin. 2003. *Teori-Teori Perlawanan dan Kekerasan Kolektif*. Surabaya: Insan Cendekia. Cet. 1.

- Benford, Robert D.; Snow, David A. 2000. *Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment*. Annu. Rev. Sociol. Vol. 26, p. 611–639.
- Buechler, Steven M. 1995. *New Social Movement Theories*. Sociological Quarterly, Vol. 36 (3) p.441. University of California Press.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Coburn, Elaine. 2016. *Marxism and Social Movement*. The Journal of the Society for Socialist Studies, Vol. 11 (1): 237-250.
- Cole, Nicki Lisa. 2018. *Theories of Ideology*. Online, (thoughtco.com/ideology-definition-3026356). Diakses 15 Nopember 2018.
- Coleman, James S.1986. *Social Theory, Social Research, and a Theory of Action*. The American Journal of Sociology, Vol. 91, (6), pp. 1309-1335.
- Collet, Martin L. and Springer, Simon. 2017. *Anarchist Political Ecology: Theoretical Horizons and Empirical Axes*. (Online), <https://www.researchgate.net/publication/308202142>. Diakses 15 Nopember 2018.
- Creswell, J.W. 2010. *Desain dan Model Penelitian Kualitatif: Biografi, Fenomenologi, Teori Grounded, Etnografi, dan Studi Kasus*. Terjemahan M.D. Moedzakir. 2010. Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan.
- Creswell, J.W. 2007. *Qualitative Inquiry & Research Design; Choosing Among Five Approaches*. New Delhi; Sage Publications. Second Edition.
- Creswell, J.W. 2013. *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*. New Delhi; SAGE Publications Iner., Pvt. Ltd. 4th ed.
- Dahrendorf, Ralf. 1959. *Class and Class Conflict in Industrial Society*. California: Stanford, University Press.
- Davies, Susanna and Hossain, Naomi. 2014. *Livelihood Adaptation, Public Action And Civil Society: A Review Of The Literature*. (Online), <https://www.researchgate.net/publication/254314877>. Diakses 29 Juli 2019.
- Della Porta, Donatella and Diani, Mario. 2006. *Social Movements: An Introduction*. UK. Blackwell Publishing Ltd. 2nd ed.
- Della Porta, Donatella. 2009. *Democracy in Social Movements*. Palgrave Macmillan St Martin's Press LLC.
- Denzin, Norman K. and Lincoln, Yvonna S. 2005. *The Sage Handbook Of Qualitative Research*. London: Sage Publications. 3rd Ed.
- Diani, Mario. 1997. *Social Movements and Social Capital: A Network Perspective on Movement Outcomes*. Mobilization: An International Journal, Vol. 2 (2): 129-147.
- Dijk, Teun A.V. 1998. *Ideology: A Multidisciplinary Approach*. London: SAGE Publications.
- Eagleton, Terry. 1991. *Ideology: An Introduction*. New York: Leaper & Gard Ltd, Great Britain.
- Elster, Jon. 2000. *Karl Marx; Marxisme-Analisis Kritis*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Fuchs, Christian. 2006. *The Self-Organization of Social Movements*. Systemic Practice and Action Research, Vol. 19 (1), p. 101-137.

- Fuchs, Christian. 2015. *Critical Theory*. University of Westminster. International Encyclopedia of Political Communication. John Wiley & Son, Inc.
- Garton, Jonathan. 2009. *The Regulation of Organised Civil Society*. Oregon: Hart Publishing.
- Giddens, Antony. 1984. *The Constitutions of Society: Outline of the Theory of Structuralism*. Cambridge: Polity Press.
- Giddens, Antony.. 2009. *Sociology*. Cambridge: Polity Press.
- Goodwin, Jeff; Jasper James M. 2006. *Emotions and Social Movements*. Department of Sociology, New York University, New York.
- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. 1994. *Competing Paradigms in Qualitative Research*. In N.K. Denzin & Y.S. Lincoln (Eds.), *Handbook of qualitative research* (pp. 105-117). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Habermas, Jurgen. 1981. *The Theory of Communicative Action*. Boston: Beacon Press.
- Hertzler, Joyce O. 1954. *Society in Action: A Study of Social Processes*. New York: The Driden Press.
- Heywood, Andrew. 2003. *Political Ideologies; An Introduction*. *Political Philosophy And Theory; UK Politics; Politics and International Studies*. Palgrave.
- Horkheimer, Max. 1972. *Critical Theory: Selected Essay*. Translated Matthew J. O'Connell, et.al. New York: The Continuum Publishing Company.
- Hummel, S. Stevens. 2016. E. N. Anderson: *Caring for Place: Ecology, Ideology, and Emotion in Traditional Landscape Management*. *Agric Hum Values*. Vol. 33, pp. 495–496.
- Jasper, James M. 2010. *Social Movement Theory Today: Toward a Theory of Action?* *Sociology Compass*. Blackwell Publishing Ltd.
- Jenkin, J. Craig. 1983. *Resource Mobilization Theory and The Study of Social Movement*. *Annual Reviews Inc*, Vol. 9: 527-553.
- Johnston, Hank; Larana, Enrique, and Gusfield, Joseph R. 1994. *New Social Movement from Ideology to Identity*. Temple University Press.
- Jost, John T. 2006. *The End of the End of Ideology*. *The American Psychological Association*. Vol. 61 (7), pp. 651–670.
- Kellner, Douglas. Tanpa Tahun. *Critical Theory and the Crisis of Social Theory*. Online, (<http://www.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/kellner.html>). Diakses 11 Desember 2018.
- Kivunja, Charles; and Kuyini, A. Bawa. 2017. *Understanding and Applying Research Paradigms in Educational Contexts*. *Journal of Higher Education*, Vol. 6 (5): p.26-6-41. Australia: Sciedu Press.
- Klandermans, Bert; and Roggeband, Conny. 2007. *Handbook of Social Movements Across Disciplines*. Springer Science_Business Media, LLC.
- Knight, Kathleen. 2006. *Transformations of the Concept of Ideology in the Twentieth Century..* *Journal American Political Science Review*, Vol. 100 (4). pp. 619-626.
- Kuhn, Thomas, S. 1989. *The Structure of Scientific Revolutions*. Penerj Tjun Surjaman. Bandung: Remaja Karya. edisi kedua.
- Lindenberg, Siegwart. 2004. *James Coleman*. University of Groningen. Online, (<https://www.researchgate.net/publication/281269361>).

- Madjid, Nurcholis. 2009. *Mewujudkan Masyarakat Madani di Era Reformasi*. Titik-Temu: Jurnal Dialog Peradaban. Volume 1 (2), 15-30.
- McAdam, Doug; McCarthy, John D.; and Zald, Mayer N. 1996. *Comparative Perspective on Social Movement: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings*. Cambridge: University Press.
- McCarthy, John D. and Zald, Mayer N. 1977. *Resource Mobilization and Social Movement: A Partial Theory*. The American Journal of Sociology, Vol. 82 (6): pp. 1212-1241. The University of Chicago Press.
- Meissonier, Regis and Houze, Emmanuel. 2010. *Toward an „IT Conflict-Resistance Theory”: Action Research During IT Pre-Implementation*. European Journal of Information Systems, Vol. 19. pp. 540–561.
- Merton, Robert K. 1968. *Social Theory and Sosial Structure*. London: The Free Press A Division of Macmillan Publishing Co., Inc.
- Michael Edwards. 2011. *The Oxford Handbook of Civil Society*. Oxford: University Press.
- Morgan, David L. 2007. *Paradigms Lost and Pragmatism Regained: Methodological Implications of Combining Qualitative and Quantitative Methods*. Journal of Mixed Methods Research, Vol. 1 (1): p.48-74.
- Neuman, W. Lawrence. 2013. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Pearson Education Limited. Edinburgh Gate. Seventh Edition.
- Oliver, Pamela E.; Cadena-Roa, J.; and Strawn, Kelley D. 2003. *Emerging Trends in The Study of Protest and Social Movements*. Research in Political Sociology, Volume 12, p. 213-244. Elsevier Science Ltd.
- Olson, Mancur. 1971. *The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups*. Cambridge: Harvard university Press.
- Oppenheimer. 2008. *Rational Choice Theory*. Department of Government and Politics, University of Maryland.
- O'Riordan, T. 1977. *Environmental Ideologies*. Journal Environment and Planning A, vol. 9, pp. 3-14.
- Parsons, Talcott. 1974. *The Stucture of Social Action*. New Delhi: Amerind Publishing Co. Pvt. Ltd.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. No. 27 Tahun 1999. *Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 27 Tahun 2012. *Tentang Izin Lingkungan*.
- Polletta, Francesca and James M. Jasper. 2001. *Collective Identity And Socialmovements*. Department of Sociology, Columbia University, 510 Fayerweather, New York, Annu. Rev. Sociol.. 27:283–305.
- Purdue, Derrick. 2007. *Civil Societies and Social Movements: Potentials and Problems*. London and New York: Routledge.
- Ramos, Valeriano. 1982. *The Concepts Of Ideology, Hegemony, And Organic Intellectuals In Gramsci's Marxism*. Online, (<https://www.marxists.org/history/erol/periodicals/theoretical-review/1982301.htm>), 03 Mei 2018
- Ritzer, George. 2011. *Sociological Theory*. New York: McGraw-Hill Companies, Inc. 8th ed.
- Ritzer, George. 2014. *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. (Penerj. Alimandan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Rosidi, Sakban. 1998. *Pencemaran Masuk Desa Ladang: Kajian Anatomi Perbenturan Kepentingan dan Pembentukan Tertib Tersiasati antara Pemilik Pabrik Pupuk Cair, Pelaku Pemerintahan Setempat, dan Warga Sekitar*. Tidak Dipublikasikan, Magister Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang.
- Salim, Emil. 1986. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Sargent, L. Tower. 1986. *Contemporary Political Ideologies*. (Penerj. Simamora, Sahat). Jakarta: Bina Aksara.
- Schaeffer, Robert K. 2014. *Social Movements and Global Social Change: The Rising Tide*. Lanham: Rowman & Littlefield.
- Scott, James, C. 1990. *Domination and the Art of Resistance*. New Haven and London: Yale University Press.
- Selva, Josue, A.N.; Domenech, Jose, L.U.; and Gash, Hugh. 2017. *What are Ideological System?* Journal System, Vol. 5 (21). pp. 1-17.
- Shaefer, Richard T. 2006. *Sociology: A Brief Introduction*. New York: McGraw-Hill. 10th ed.
- Simon, Tal, and Ingram, Paul. 2004. *An Ecology of Ideology: Theory and Evidence from Four Populations*. Journal Industrial and Corporate Change, Vol 13 (1). pp. 33-59.
- Snow, David A., Soule, Sarah A., and Kriesi, Hanspeter. 2006. *The Blackwell Companion to Social Movements*. UK:Blackwell Publishing Ltd.
- Stake, Robert E. 2003. *Strategy of Qualitative Inquiry*. Thousand Oaks. CA: Sage.
- Stolley, Kathy S. 2005. *The Basics Of Sociology*. London: Greenwood Press.
- Sukmana, Oman. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.
- Sunstein, Cass R. 1996. *Social Norms and Social Roles*. Journal Columbia Law Review, Vol. 96: pp. 903-968.
- Sweezy, Paul. M. 1960. *Marxian Socialism: Power Elite or Rulling Class?* New York: Monthly Review Press.
- Tejerina, Benjamín and Perugorria, Ignacia. 2012. *From Social to Political New Forms of Mobilization and Democratization*. Conference Proceedings. Universidad del Pais Vasco.
- Tonnies, Ferdinand. 2001. *Gemeinschaft und Gesellschaft*. (Ed. Harris, Jose. 2001).Cambridge: University Press.
- Turner, Jonathan, H. 1974. *The Strucutre of Sociological Theory*. Chicago: The Dorsey Press. Fourth Edition.
- Turner, Jonathan, H. 1986. *The Structure of Sociological Theory*. Chicago: The Dorsey Press. Fourth Edition.
- Turner, Jonathan, H. 2006. *Handbook of Sociological Theory*. New York: Springer Science +Business Media, LLC.
- Undang-Undang Republik Indonesia. No. 6 Tahun 2014. *Tentang Desa*.
- Veeger, K.J. 1985. *Realitas Sosial; Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu-Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Jakarta; Gramedia.
- Veltmeyer, Henry. 2004. *Civil Society and Social Movements The Dynamics of Intersectoral Alliances and Urban-Rural Linkages in Latin America*. United Nations Research Institute for Social Development.

- Vinithagen, Stellan and Johansson, Anna. 2013. *Everyday Resistance: Exploration of a Concept and its Theories*. Resistance Studies Magazine. No1, pp. 1-46.
- Vladimirov, Lyubomir, and Georgieva, Petya. 2014. "Green Ideology" and the Risk for the Environment – Political Aspects, Morphology and Functions. НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 53, серия 1.2.
- Waters, Malcolm. 1994. *Modern Sociological Theory*. London: SAGE Publications Ltd.
- Willems, Jurgen & Jegers, Marc. 2012. *Social Movement Structures in Relation to Goals and Forms of Action: An Exploratory Model*. Canadian Journal of Nonprofit and Social Economy Research Vol. 3 (2): pp. 67 – 81.
- Wilson, Ross. 2007. *Theodor Adorno*. New York: Routledge.
- Yin, Robert, K. 2009. *Case Study Research: Design and Methods*. London: SAGE Publications Ltd. Second Ed.
- Young, Patricia C. 1962. *The sociology of Emile Durkheim*. Honors Theses.

